

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA BPKAD PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh :

NOVITA RIYATI SUKMA

NIM. 0502161047

**Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA BPKAD PROVINSI SUMATERA UTARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

NOVITA RIYATI SUKMA

NIM. 0502161047

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Novita Riyati Sukma**
NIM : 0502161047
Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 2 Februari 1999
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln Pahlawan, Desa Simpang Empat, Kec Lawe
Bulan, Kab Aceh Tenggara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BPKAD PROVINSI SUMATERA UTARA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Novita Riyati Sukma

NIM. 0502161047

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA BPKAD PROVINSI SUMATERA UTARA**

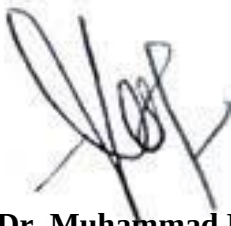
Oleh:

Novita Riyati Sukma

NIM. 0502161047

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah
Medan, 17 November 2020

Pembimbing I

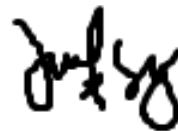


Dr. Muhammad Ridwan, M.A

NIP. 19760820 200312 1 004

NIDN. 2020087604

Pembimbing II

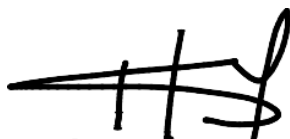


Laylan Syafina, M.Si

NIP. 19910827 201801 2 002

NIDN. 2027089103

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Hermain, M.Pd

NIP. 19730510 199803 1 003

NIDN. 2010057302

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BPKAD PROVINSI SUMATERA UTARA**”, Novita Riyati Sukma, NIM 0502161047 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 22 Januari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah di UIN Sumatera Utara.

Medan, 22 Januari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU
Sekretaris,

Ketua,



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst. M.A
NIDN. 2001077903

Anggota



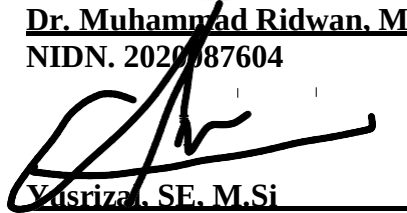
Kusmilawaty S.E. Ak. M.Ak
NIDN. 2014068001



Dr. Muhammad Ridwan, M.A
NIDN. 2020087604



Laylan Syafina, M.Si
NIDN. 2027089103

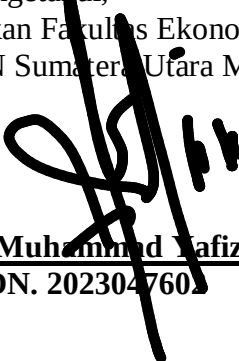


Yusriza, S.E. M.Si
NIDN. 2022057501



Nurwani, M.Si
NIDN. 0126038901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047601

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara” atas nama Novita Riyati Sukma di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan, M.A dan Pembimbing Skripsi II oleh Ibu Laylan Syafina, M.Si.

Dalam upaya mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah yang baik maka perlu untuk merealisasikan pemerintahan yang professional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis serta pengendalian internal yang memiliki keterkaitan kuat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKAD provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 123 pegawai, sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* sampel terpilih sebanyak 60 responden. Pengumpulan data primer menggunakan kuisioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Secara simultan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Hasil pengujian secara parsial atau individu menunjukkan bahwa *good governance* dan pengendalian internal masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

Kata Kunci : *Good Governance*, Pengendalian Internal, Kinerja Pengelolaan Keuangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada batasnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BPKAD PROVINSI SUMATERA UTARA**”. Tak lupa pula shalawat berangkai salam penulis haturkan kepada junjungan alam Rasulullah SAW. Semoga syafaatnya mengalir pada kita di hari akhir kelak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat penyelesaian studi Pendidikan Strata Satu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Pertama-tama penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta serta mengucapkan terimakasih yang teristimewa dan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis ayahanda **Ali Sadikin S.Pd** dan ibunda **Hanisah Selian S.Pd** yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan curahan cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga untuk anaknya serta memberikan bantuan moril dan materil, semangat, kepercayaan, motivasi dan do'a yang sangat luar biasa yang tiada hentinya kepada penulis yang mampu membawa penulis menyelesaikan skripsi ini dalam menggapai gelar sarjana. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, karunia dan keberkahan dunia akhirat atas segala jasa dan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda yang tiada terkira.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa semua proses ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai

pihak. Oleh karena itu izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Fauzi Arif Lubis, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Marliyah, M.A selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Kusmilawaty, SE, Ak, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak Rahmat Daim Harahap, S.E.I, M.Ak selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi akademik selama penulis menyelesaikan studi akademik ini.
9. Bapak Dr. Muhammad Ridwan, M.A selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Laylan Syafina, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II, yang senantiasa dengan sabar dan ikhlas membimbing, memberikan sumbangan pikiran, motivasi, masukan dan saran serta selalu meluangkan waktu dan tenaganya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu yang luar biasa selama penulis menyelesaikan studi.

11. Seluruh Pegawai dan Staff BPKAD Provinsi Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.
12. Kepada adik saya tersayang Abdul Haris Kombih dan Faisal Khairi Kombih, terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, motivasi, canda tawa serta do'anya yang luar biasa sehingga kak Iya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada apun tersayang Jumala Selian, terimakasih karena telah memberikan motivasi, do'a dan curahan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Tidak lupa untuk adik kecil Ahmad Hamzah Fansuri dan Fatimah Mikhayla Alisa yang selalu mensupport dengan canda tawa saat jenuh dan lelah.
14. Kepada yang terkasih Muhammad Sutan Habibi Lubis S.Pd terimakasih banyak selalu memberikan waktu luang, tenaga, semangat, dukungan, motivasi serta do'a yang sangat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat terbaik penulis Fadila Sari Mayola, Maulina Annisak, Rizkia Putri, Tri Alas Putri, Ade Trilia, terimakasih buat do'a, dukungan, bantuan dan persahabatannya selama ini.
16. Buat rekan seperjuangan Akuntansi Syariah stambuk 2016 terkhusus kelas A yang selama empat tahun selalu memberikan kenangan yang tidak dapat dilupakan. Terimakasih buat semuanya, dan sukses buat kita semua, Amin.☺
17. Keluarga KKN 19 di Kelurahan Pekan Tanjung Pura yang telah mengukir keindahan selama 1 bulan penuh bersama juga bantuan dan motivasi kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 22 Januari 2021
Penulis,

Novita Riyati Sukma
NIM. 0502161047

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	10
A. Kinerja	10
1. Pengertian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.....	10
2. Pengukuran Kinerja	12
3. Sistem Pengukuran Kinerja	13
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	15
5. Indikator Kinerja	16
6. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja.....	17
B. <i>Good Governance</i>	18
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	18
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	20
3. Hambatan dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	22

C. Pengendalian Internal	22
1. Pengertian Pengendalian Internal	22
2. Unsur-Unsur Pengendalian Internal	24
3. Tujuan Pengendalian Internal	25
4. Keterbatasan Pengendalian Internal	26
D. Penelitian Terdahulu	26
E. Kerangka Konseptual	32
F. Hipotesa	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
1. Lokasi Penelitian	36
2. Waktu Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	36
1. Populasi	36
2. Sampel	37
D. Data Penelitian	38
1. Jenis Data	38
2. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Definisi Operasional	40
G. Teknik Analisa Data	43
1. Statistik Deskriptif	43
2. Uji Kualitas Data	43
a. Uji Validitas (<i>Validity Test</i>)	44
b. Uji Reabilitas (<i>Reability Test</i>)	44
3. Uji Asumsi Klasik	45
a. Uji Normalitas Data	45
b. Uji Autokorelasi	47
c. Uji Multikolinearitas	47
d. Uji Heteroskedastisitas	48

4. Regresi Linear Berganda	49
5. Uji Hipotesis Penelitian.....	49
a. Mencari Koefisien Determinasi (R^2).....	49
b. Uji Statistik t (t-test)	50
c. Uji Statistik F (F test)	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
1. Sejarah Singkat BPKAD Provinsi Sumatera Utara	52
2. Visi dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera Utara	53
a. Visi BPKAD Provinsi Sumatera Utara	53
b. Misi BPKAD Provinsi Sumatera Utara.....	53
3. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Utara.....	53
4. Struktur Organisasi.....	54
B. Deskripsi Data Penelitian	55
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	55
2. Uji Kualitas Data	60
a. Uji Validitas (<i>Validity Test</i>)	60
b. Uji Reabilitas (<i>Reability Test</i>)	62
3. Uji Asumsi Klasik	63
a. Uji Normlitas Data	63
b. Uji Autokorelasi	65
c. Uji Multikolinearitas	66
d. Uji Heteroskedastisitas	66
4. Regresi Linear Berganda	67
5. Uji Hipotesis Penelitian.....	69
a. Koefisien Determinasi (R^2)	69
b. Uji Statistik t (t-test)	69
c. Uji Statistik F (F-test).....	71
C. Pembahasan	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75

B. Saran.....	76
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	26
3.1 Jumlah Pegawai yang Terlibat pada Bidang Akuntansi, bidang pengelolaan anggaran dan bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	37
3.2 Skor Jawaban Responden	40
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	41
3.4 Nilai Durbin Waston (DW)	47
4.1 Data Sampel Penelitian	55
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	56
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	57
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	57
4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	58
4.7 Statistik Deskriptif Variabel.....	59
4.8 Uji Validitas <i>Good Governance</i> (X_1)	60
4.9 Uji Validitas Pengendalian Internal (X_2)	61
4.10 Uji Validitas Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y).....	61
4.11 Uji Reabilitas.....	62
4.12 Uji <i>Kolmogrov-Smirnov</i>	65
4.13 Uji Autokorelasi	65
4.14 Uji Multikolinearitas	66
4.15 Analisis Regresi Linier Berganda	68
4.16 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	69
4.17 Uji t	70
4.18 Uji F	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	33
4.1 Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Utara	54
4.2 Histogram	63
4.3 Pendekatan Normalitas P-Plot	64
4.4 Scatterplot	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I Surat Penelitian	82
II Instrumen Penelitian	84
III Frekuensi Data Berdasarkan Identitas	89
IV Daftar Distribusi Jawaban Responden	90
V Uji Validitas dan Reabilitas	95
VI Uji Asumsi Klasik	97
VII Analisis Regresi Linier Berganda	101
VIII Hasil Uji Hipotesis	102

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi membawa perubahan pada sistem pemerintahan yang semula adalah sentralisasi lalu menjadi desentralisasi. Pada era otonomi daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.¹

Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespon tuntutan masyarakat terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power* (membagi dan berbagi kekuasaan), *distribution of income* (distribusi pendapatan) dan kemandirian sistem manajemen di daerah, banyak ditemui berbagai hambatan, permasalahan dan kendala yang mengharuskan adanya suatu penyempurnaan dalam pengaturan otonomi daerah tersebut. Beberapa misi yang terkandung dalam sistem otonomi daerah adalah: pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, kedua meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, ketiga memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah.² Sehubungan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang di ikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah reformasi manajemen publik (*public management reform*) yang berorientasi pada kinerja.

Lahirnya otonomi daerah merupakan bagian upaya dari “*Good Governance*” atau upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik yang berjalan di

¹ Karlina Ghazalah Rahman, “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar”, (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h. 1.

² Nur Azlina dan Ira Amelia, “Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan”, (Jurnal Akuntansi Universitas Jember , Vol.12 No. 2, 2014), h. 32.

Indonesia. Upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik ini merupakan salah satu unsur yang mencerminkan keinginan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam indikator upaya penegakan hukum, transparansi dan pencapaian partisipasi. Dalam konsep *good governance*, negara berperan memberikan pelayanan yang baik dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna serta berhasil guna.

Kinerja keuangan adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pegawai yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Kinerja keuangan dibagi atas dua bagian aktivitas yaitu pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan. Pelaporan keuangan berhubungan dengan informasi-informasi keuangan yang telah dan akan digunakan untuk mendukung para entitas dalam pengambilan keputusan yang akan datang. Sedangkan pengelolaan keuangan berhubungan dengan aktivitas mengatur dan mengelola jalannya transaksi keuangan seperti aset guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparansi.³

Kinerja suatu pemerintahan dikatakan baik apabila penerapan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sudah dilaksanakan dengan baik. Diantaranya yaitu penerapan prinsip-prinsip *good governance*, jika prinsip *good governance* telah dilaksanakan dengan baik yaitu prinsip transparansi, prinsip partisipasi, prinsip pengawasan, prinsip akuntabilitas, prinsip daya tanggap, prinsip profesionalisme, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip kesetaraan, prinsip wawasan ke depan dan prinsip penegakan hukum. Adapun indikator dalam pengukuran kinerja yaitu masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah

³ Rahman, *Pengaruh Penerapan Good Governance*, h. 5.

berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.⁴

Diketahui bahwa terjadi kehilangan uang di kantor BPKAD provinsi Sumatera Utara. Hal ini terjadi karena kelalaian dan kemunduran sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan informasi pada tanggal 11 September 2019 telah terjadi kehilangan pada BPKAD pemerintah provinsi Sumatera Utara yaitu kehilangan uang negara yang akan digunakan untuk membayarkan gaji kegiatan honorer, Indra Saleh mengatakan, uang yang dicairkan melalui Bank Sumut itu digunakan pemerintah untuk membayarkan kegiatan honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Uangnya itu untuk membayarkan gaji kegiatan honor," jelasnya. Awalnya uang tersebut diambil dari Bank Sumut, yang berada di Jalan Imam Bonjol. Dan yang bertugas untuk mengambil uang tersebut, Muhammad Aldi sebagai pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Setelah mendapatkan informasi dari bendahara untuk mengambil uang, ia langsung bergerak ke bank Sumut. Dirinya sampai pada pukul 14.00 WIB dan melakukan penarikan uang tunai dan langsung menuju kantor gubernur. Setelah masuk ke kantor gubernur, Aldi yang ditemani oleh tenaga honorer BPKAD Indrawan Ginting. Tetapi, mereka tidak langsung memarkirkan kendaraan, dirinya memutar halaman parkir untuk mencari tempat parkir yang ia rasa aman. Uang yang berada di dalam tas itu diletakkan mereka berdua pada bagian belakang mobil yang dianggap aman. Setelah itu, mereka berdua langsung masuk ke kantor gubernur untuk melaksanakan salat dan absen pulang. Kemudian, pada pukul 17.00 WIB Indrawan Ginting hendak menuju ke mobil dan melihat tas berisi uang tersebut sudah tidak berada ditempatnya.

⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 121.

Melihat tas berisi uang tidak ada, dirinya panik dan langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan dan diperiksa sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Indra Saleh menjelaskan, mengapa uang tersebut bisa ditarik secara tunai melainkan bukan di transfer melalui bank. Atas perintah gubenrur, kata dia uang tersebut bisa dicairkan Setelah mendapatkan surat keputusan dari gubernur, maka bendahara BPKAD kemudian memerintahkan Aldi untuk mengambil uangnya di Bank Sumut. Kepolisian Daerah Sumut juga melihat adanya kejanggalan pada kejadian uang senilai miliaran rupiah itu raib di kantor gubernur. Sebab, saat ini transaksi dengan uang begitu banyak seharusnya dilakukan dengan transfer antar rekening bank.⁵

Menurut Direktur Eksekutif Forum Indonesia hilangnya uang dipelataran parkir kantor gubernur, menurut kami merupakan kelalaian dan kemunduran sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diketahui Provinsi Sumatera Utara telah cukup lama di supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga pencatatan pembukuan akuntabilitas pembayaran pasti sudah mengikuti standar baku keuangan yang disyaratkan, termasuk soal pembayaran non tunai.⁶ Dampak dari masalah kehilangan ini adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Penerapan transparansi pada BPKAD masih belum maksimal hal ini disebabkan adanya akses terhadap beberapa laporan keuangan seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tidak dapat di akses oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakat membutuhkan informasi tersebut masyarakat harus ke kantor terlebih dahulu. Informasi digunakan oleh banyak pihak atau pengguna dengan masing-masing kepentingannya. Kepentingan antara

⁵ Satia, "Pejabat BPKAD Sumut Bantah Uang yang Hilang di Parkiran Pemprov Sumut Rp1,6 Miliar untuk Hal Ini, <http://medan.tribunnews.com/amp/2019/09/14/pejabat-bpkad-sumut-bantah-uang-yang-hilang-di-parkiran-pemprov-sumut-rp-16-miliar-untuk-hal-ini>. Diunduh pada tanggal 17 Januari 2020.

⁶ Satia, "Pengamat Anggaran Sebut Faktor Kelalaian Sangat Menonjol, Raibnya Uang Pemprov Sumut Rp 1,6 M, <https://medan.tribunnews.com/am>. Diunduh pada tanggal 17 Januari 2020.

satu pengguna dengan para pengguna lainnya tidak sama sehingga informasi yang dicari pun berbeda.⁷ Meningkatkan kinerja pemerintah dengan baik yaitu dengan melakukan keterbukaan informasi yang relevan maupun akurat. Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah. Langkah yang diambil untuk mewujudkan *Good Governance* adalah dengan melanjutkan upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif sehingga dalam kinerja pemerintah diharapkan meningkat.

Selain melalui *good governance*, kinerja aparatur pemerintah yang baik juga dapat didukung melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.⁸

Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan kinerja aparatur pemerintah bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Sumatera Utara selain pemeriksaan oleh inspektorat, pemprovsu bisa melakukan evaluasi sekaligus perbaikan sistem yang lemah dan masih longgar terkait dengan masalah hilangnya uang negara tersebut untuk menghindari kejadian tersebut terulang kembali. Sebelumnya banyak peneliti yang telah melakukan penelitian tentang

⁷ Hendra Harmain, *et. al.*, *Pengantar Akuntansi 1*, (Medan: Madenatera, 2019), h. 5.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, h. 2.

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Karlina Ghazalah Rahman (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rino Pandhu Wibowo (2018) dengan judul Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus pada Pemerintah Desa Banjarjarum. Menunjukkan hasil bahwa penerapan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Banjarjarum. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) dengan judul Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Menunjukkan hasil bahwa Penerapan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian ini adalah Penerapan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Sunarmo, dkk (2018) dengan judul penelitian Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi SDM terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip *good government governance* tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah sedang sistem pengendalian intern pemerintah signifikan berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia signifikan berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah dan penelitian yang dilakukan oleh Taufeni Taufik dan Dian Kemala (2013) dengan judul Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip *Good Governance*, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik.

Hasil penelitian ini adalah pemahaman prinsip-prinsip *good governance*, pengendalian intern dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja sektor publik. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irene Sekar Lintang Christy (2020) dengan judul penelitian Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan adalah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreas Wahyu Anggoro Putro (2018) dengan judul Pengaruh Pengendalian Intern dan *Good Governance* Terhadap Kinerja di Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan adalah sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu **“Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Kelalaian dan kemunduran sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Penerapan transparansi masih belum maksimal, hal ini disebabkan adanya akses terhadap beberapa laporan keuangan seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tidak dapat di akses oleh masyarakat.
3. Kurangnya sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan hilangnya uang negara.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada *good governance*, pengendalian internal, dan kinerja pengelolaan keuangan. Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan hanya meneliti pengaruh penerapan *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengembangan keilmuan di bidang akuntansi dan dapat terus ditingkatkan, terutama dalam membuktikan teori-teori yang melandasi penelitian, yaitu penilaian kinerja sektor publik khususnya pemerintah daerah dengan menciptakan tata kelolaan pemerintahan (*good governance*) dan pengendalian internal yang tercipta dengan baik.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat/publik.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan tambahan bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam segala pengambilan kebijakan publik baik pelaksanaan maupun pengawasannya.

3) Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian bagi peneliti selanjutnya.

4) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh penerapan *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kinerja

1. Pengertian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang di bebaskan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.⁹ Adapun tiga level kinerja, yaitu:

- a. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (*outcome*) pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
- b. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
- c. Kinerja individu/ pekerjaan; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

Dalam berbagai literatur, pengertian tentang kinerja sangat beragam. Akan tetapi dari berbagai perbedaan pengertian, dapat dikategorikan dalam dua garis besar, yaitu:

- a. Kinerja merujuk pengertian sebagai hasil yaitu kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu. Dapat ditekankan bahwa pengertian kinerja sebagai hasil bukan karakter sifat dan

⁹ Sunarji Harahap, *Pengantar Manajemen* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 319.

perilaku. Pengertian kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang di hasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi.

- b. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku. Kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja.¹⁰

Pengertian kinerja dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu pencapaian hasil atas kegiatan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan capaian dalam sebuah organisasi baik yang dicapai secara perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan tujuan dan visi organisasi itu sendiri dengan cara yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh organisasi.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.¹² Seperti dengan mengikuti prosedur maupun peraturan yang telah ditetapkan dalam perusahaan maupun suatu lembaga.

Keuangan daerah adalah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

¹⁰ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 8.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, h. 4.

¹² Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.¹³

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pencatatan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.¹⁴ Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian serta pengendalian. Sebagai suatu bidang yang mampu menetapkan teknik-teknik dan konsep-konsep yang tetap dalam pengelolaan data ekonomi yang rasional, akuntansi manajemen membuat keputusan-keputusan rasional dengan suatu pandangan daerah pencapaian tujuan.¹⁵ Pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju “*clean government*” atau pemerintahan yang bersih¹⁶.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola aset daerah dalam bentuk pencatatan transaksi yang telah dilakukan selama tahun berjalan dan dirumuskan dalam bentuk laporan keuangan setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan dan standar yang sudah ada.

2. Pengukuran Kinerja

Lembaga Administrasi Negara/LAN (2000) telah mengembangkan konsep dan ukuran kinerja cukup operasional. Menurut LAN (2000), pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan

¹³ Budi Setiawan, *Menganalisa Statistik Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 21* (Yogyakarta: Andi, 2013), h. xxiii.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, h. 3.

¹⁵ Muammar Khaddafi, *et. al.*, *Akuntansi Biaya* (Medan: Madenatera, 2017), h. 4.

¹⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 167.

keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas.¹⁷

Pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan bagi para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi.

Standar pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur 4 hal, yaitu:

- a. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan.
- b. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur sifat/ karakter pribadi (*traits*).
- c. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur hasil dari pekerjaan yang dicapai.
- d. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur perilaku atau tindakan-tindakan dalam mencapai hasil.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan suatu organisasi untuk menilai kinerja yang telah dilaksanakan sudah sesuai dan mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai.

3. Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat

¹⁷ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan*, h. 19.

¹⁸ *Ibid.*, h. 11.

dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment system* (sistem penghargaan dan hukum).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Oleh pihak legislatif, ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan (*cost of service*) yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak terus-menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Masyarakat menghendaki pemerintah dapat memberikan banyak pelayanan dengan biaya yang murah.

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangible* output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kinerja non-finansial.¹⁹

Menurut BPKP (2000) cakupan pengukuran kinerja sektor publik harus mencakup item-item sebagai berikut:

- a. Kebijakan (*policy*), untuk membantu pembuatan maupun pengimplementasian kebijakan.

¹⁹ Mardiasmo, *Akuntansi*, h. 121.

- b. Perencanaan dan penganggaran (*planning and budgeting*), untuk membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana.
- c. Kualitas (*quality*), untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan maupun keefektifan organisasi.
- d. Kehematan (*economy*), untuk me-review pendistribusian dan keefektifan penggunaan sumber daya.
- e. Keadilan (*equity*), untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat.
- f. Pertanggungjawaban (*accountability*), untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan.²⁰

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 ada 3 indikator dalam pengukuran kinerja yaitu masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Indikator tersebut dapat dijabarkan dalam konsep pengukuran kinerja yang disebut *value for money*.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

- a. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*.
- c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.

²⁰ Rino Pandhu Wibowo, "Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa" (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018), h. 16.

- d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
- e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.²¹

5. Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dapat diukur dengan menggunakan konsep *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yaitu:

a. Ekonomi

Ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

b. Efisiensi

Efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

c. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/ kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan

²¹ Nur Athiyah Rahmah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palu", (Jurnal *Katagolis* Universitas Tadulako, Vol.4 No. 9, 2016), h. 18.

hasil yang sesungguhnya dicapai.²² Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output.²³

6. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*);
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi;
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *good congruence*; dan
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat pengukuran kinerja:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem kinerja yang telah disepakati;
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah

²² Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 161.

²³ Mardiasmo, *Akuntansi*, h. 4.

terpenuhi;

- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; dan
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.²⁴

B. *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Istilah *good and clean governance* merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Ia muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah *good corporate*.

Di Indonesia, substansi wacana *good governance* dapat dipadankan dengan istilah pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik serta ekonomi. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (*good governance*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggungjawab.²⁵

Wacana *good governance* sering kali dikaitkan dengan tuntutan akan pengelolaan pemerintah yang profesional, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pemerintah yang bersih dari KKN adalah bagian penting dari pembangunan demokrasi dan HAM di Indonesia.

Menurut UNDP pemerintahan yang baik di cerminkan melalui sinergis

²⁴ *Ibid.*, h. 122.

²⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003).h. 198.

dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan yang baik menjadi tanggung jawab pemerintah dengan di dukung masyarakat dan sekttor swaasta.²⁶

Di sisi lain menurut World Bank *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha.²⁷

Menurut pandangan syariah suatu pengertian *governance* di dalam ayat Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi :

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kekuasaan mereka dimuka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan.²⁸

Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa *governance* dalam perspektif syariah adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniannya sebagaimana

²⁶ Arnida Wahyuni Lubis, *Pemeriksaan Kinerja Sektor Publik*, (Medan: Modul Pemeriksaan Kinerja Sektor Publik, 2018), h. 82.

²⁷ Mardiasmo, *Akuntansi*, h. 18.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Syaamil Cipta Media, 2005), h. 337.

disimbolkan oleh penegakan salat, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi disimbolkan dengan membayar zakat, dan penciptaan stabilitas politik dan keimanan. Dengan memperhatikan ayat tersebut dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, ukhuwah dan amanah.

Sejalan dengan teori-teori diatas jelas bahwa pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Pemerintahan yang baik harus didukung dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Ketersediaan informasi merupakan unsur utama dari akuntabilitas. Setiap individu dalam organisasi pemerintahan bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakannya sesuai dengan wewenangnya. baik dalam proses maupun hasil-hasilnya.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Untuk merealisasikan pemerintahan yang professional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip *good governance*, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan Sembilan aspek fundamental (asas) dalam *good governance* yang harus diperhatikan, yaitu partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), responsif (*responsiveness*), orientasi kesepakatan (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efektivitas (*effectiveness*) dan efisiensi (*efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*).²⁹

Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) adalah sebagai berikut:

a. *Participation* (Partisipasi)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas

²⁹A. Ubaedillah *Pancasila, Demokrasi, HAM*, h. 198.

dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- b. *Rules of law* (Penegakan hukum)
Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency* (Transparansi)
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness* (Responsif)
Lembaga-lembaga dan proses harus ditujukan untuk melayani *stakeholders*.
- e. *Consensus orientation* (Orientasi Kesepakatan)
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity* (Kesetaraan)
Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and Effectiveness* (Efisiensi dan Efektivitas)
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability* (Akuntabilitas)
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision* (Visi Strategis)
Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi ke depan.³⁰

Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

³⁰ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 24.

Hal ini karena pada akhirnya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat melindungi dan mengendepankan kepentingan publik. Prinsip-prinsip tersebut tidaklah berdiri sendiri, prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dalam satu kesatuan hubungan yang erat, sehingga masing-masing prinsip menjadi instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya. Keseimbangan prinsip-prinsip *good governance* tersebut apabila diterapkan, maka dapat memudahkan organisasi sektor publik dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat.

3. Hambatan dalam Mewujudkan *Good Governance*

Salah satu agenda reformasi total di Indonesia adalah menciptakan *good governance* dalam rangka membentuk Indonesia baru. Harus diakui bahwa saat ini *good governance* masih menjadi mimpi besar bagi bangsa Indonesia. Jika dilihat dari kacamata akuntansi sektor publik terdapat tiga permasalahan utama mengapa *good governance* masih jauh dari kenyataan. Pertama, belum adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. Tidak adanya sistem akuntansi yang handal menyebabkan lemahnya pengendalian internal (*internal control*) pemerintah daerah. Kedua, sangat terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.³¹ Ketiga, belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku. Standar akuntansi tersebut sangat penting sebagai pedoman untuk pembuatan laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian.³²

C. Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

IAI mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan

³¹ *Ibid.*, h. 42.

³² *Ibid.*, h. 43.

tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.³³

Pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pengendalian intern meliputi organisasi dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai seberapa jauh dapat dipercanya data akuntansi. Meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan. Jadi pengendalian intern meliputi pengendalian akuntansi (*accounting control*) dan pengendalian administrasi (*administrative control*).³⁴

Selanjutnya yang disebut dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah: “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu cara bukan suatu hasil akhir. Pengendalian intern berisi serangkaian tindakan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam infrastruktur organisasi dan juga merupakan pengguna semua sumber daya organisasi untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi

³³ Agoes Sukrisno, *Auditing Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik* (Jilid I), (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 79.

³⁴ Amin Widjaja Tunggal, *Struktur Pengendalian Intern* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 1.

berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan tercapainya tujuan dengan meningkatkan kinerja.

2. Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur :

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya

b. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam rangka melakukan penilaian risiko, instansi pemerintah wajib menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko yang dimaksud meliputi:

1. Identifikasi risiko

2. Analisis risiko .

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah terkait.

d. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut wajib dilakukan secara efektif.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan instansi pemerintah wajib melaksanakan pemantauan melalui: (1) Pemantauan berkelanjutan, dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. (b) Evaluasi terpisah, diselenggarakan melalui penilaian sendiri, riviui, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat

dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah ataupun aparat eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.³⁵

3. Tujuan Pengendalia Internal

Tujuan yang dimaksudkan dalam pengendalian internal menurut *The Committee of Sponsoring Organization* (COSO) adalah sebagai berikut :

a. Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Operasional Perusahaan

Pengendalian internal dalam suatu organisasi dapat menjadi instrumen agar penggunaan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam operasi perusahaan.

b. Keandalan Pelaporan Keuangan

Pengendalian internal yang ada membuat manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan untuk pihak internal maupun eksternal organisasi.

c. Kepatuhan terhadap Hukum dan Aturan yang berlaku

Pengendalian internal ini bertujuan agar organisasi melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Pengendalian internal dilakukan untuk melihat seberapa jauh perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan berlangsung dengan lancar. Perencanaan tidak hanya sekedar dibuat saja, tetapi harus bisa menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada.³⁶

Menurut Amin (1995: 2) tujuan sistem penendalian internal yang efektif dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi.
- b. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya.
- c. Untuk menggalakkan efisiensi usaha.

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, h. 4.

³⁶ Wibowo, *Pengaruh Penerapan Good Governance*, h.. 25.

- d. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan.

4. Keterbatasan Pengendalian Internal

Terlepas dari bagaimana bagus desain dan operasinya, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Disamping itu pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Karlina Ghazalah Rahman (2016)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja	Variabel Independen: a. <i>Good Governance</i> (X ₁) b. Pengendalian Internal (X ₂) Variabel Dependen: a. Kinerja Pengelolaan	1. Penerapan prinsip <i>good governance</i> berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di kota Makassar. 2. Pengendalian

		Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar	Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di kota Makassar. 3. Penerapan <i>good governance</i> dan pengendalian secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di kota Makassar.
2.	Rino Pandhu Wibowo (2018)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus pada Pemerintah Desa	Variabel Independen: a. <i>Good Governance</i> (X ₁) b. Pengendalian Internal (X ₂) Variabel Dependen: a. Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa (Y)	1. Penerapan prinsip <i>good governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah desa Banjajarum. 2. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah desa Banjajarum. 3. Penerapan <i>good governance</i> dan

		Banjajarum		pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Banjajarum.
3.	Nur Azlina dan Ira Amelia (2014)	Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan	Variabel Independen: a. <i>Good Governance</i> (X_1) b. Pengendalian Internal (X_2) Variabel Dependen: a. Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah (Y)	1. Penerapan variabel <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan. 2. Pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 3. Penerapan <i>good governance</i> dan pengendalian internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
4.	Agus Sunarmo, dkk (2018)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good</i>	Variabel Independen: a. <i>Good Government Governance</i>	1. Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Government Governance</i> secara

		<i>Governmen</i> <i>t</i> <i>Governance</i> , Sistem Pengendalia n Intern Pemerintah, dan Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	(X₁) b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X₂) c. Kompetensi SDM (X₃) Variabel Dependen: a. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y)	tidak searah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. 2. Sistem pengendalian intern pemerintah secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. 3. Kompetensi sumber daya manusia secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. 4. Penerapan prinsip- prinsip <i>good</i> <i>government</i> <i>governance</i> tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah sedang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
--	--	---	--	---

				signifikan berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah dan Kompetensi sumber daya manusia signifikan berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah daerah.
5.	Andreas Wahyu Anggoro Putro (2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja di Pemerintah Kota Yogyakarta	Variabel Independen: a. Sistem Pengendalian Internal (X_1) b. <i>Good Governance</i> (X_2) Variabel Dependen: a. Kinerja Pemerintah (Y)	1. Sistem Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja. 2. <i>Good governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 3. Sistem Pengendalian intern dan <i>Good governance</i> berpengaruh terhadap kinerja.
6.	Taufeni Taufik dan Dian Kemala (2013)	Pengaruh Pemahaman Prinsip- Prinsip <i>Good</i>	Variabel Independen: a. Pemahaman Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	1. Penerapan variabel Pemahaman Prinsip- Prinsip <i>Good Governance</i> berpengaruh

		<i>Governance</i>, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik	(X₁) b. Pengendalian Internal (X₂) c. Komitmen Organisasi (X₃) Variabel Dependen: a. Kinerja Sektor Publik (Y)	terhadap Kinerja Sektor Publik. 2. Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Sektor Publik. 3. Penerapan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Sektor Publik. 4. Pemahaman Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Sektor Publik.
7.	Irene Sekar Lintang Christy (2020)	Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian inter Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah	Variabel Independen: a. <i>Good Governance</i> (X₁) b. Pengendalian Intern Pemerintah (X₂) Variabel Dependen: a. Kinerja	1. <i>Good Governance</i> berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

		Daerah	Pemerintah Daerah(Y)	
--	--	--------	-------------------------	--

Sumber: Penelitian terdahulu

E. Kerangka Konseptual

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) pada saat ini merupakan prioritas yang paling utama dalam penegakan citra pemerintah yang sampai saat ini dianggap masih sangat rendah. Dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintah daerah pun akan tercapai dengan baik.

Kinerja suatu pemerintahan dikatakan baik apabila tingkat penerapan prinsip-prinsip *good governance* telah dilaksanakan dengan baik yaitu prinsip transparansi, prinsip partisipasi, prinsip pengawasan, prinsip akuntabilitas, prinsip daya tanggap, prinsip profesionalisme, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip kesetaraan, prinsip wawasan ke depan dan prinsip penegakan hukum. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Namun yang terjadi dilapangan adalah masih terjadi kelalaian dan kemunduran sistem akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan daerah.

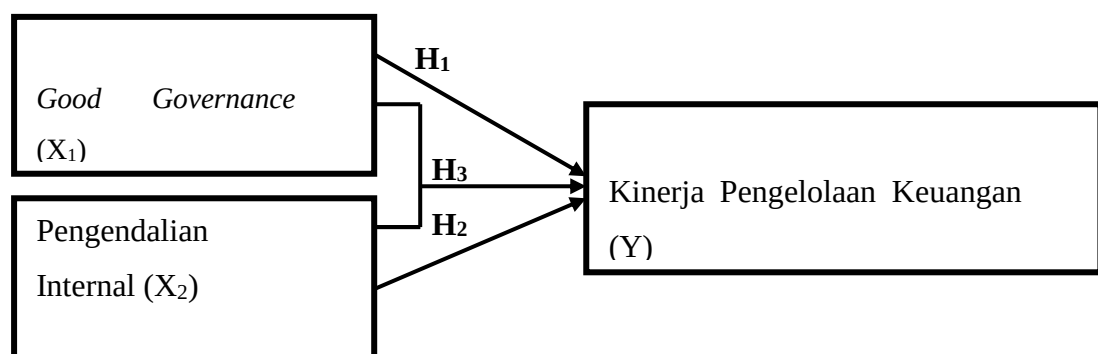
Meningkatkan kinerja pemerintah dengan baik dengan melakukannya keterbukaan informasi yang relevan maupun akurat. Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja

pemerintah. Dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah namun pada BPKAD provinsi Sumatera Utara penerapan transparansi masih belum maksimal.

Pengendalian Internal memiliki keterkaitan yang kuat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan suatu organisasi. Adapun unsur pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Adanya pengendalian internal bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang berguna memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja suatu organisasi dapat dikatakan baik apabila tujuan organisasi tersebut dapat tercapai, dengan diterapkannya *good governance* dan adanya pengendalian internal dalam organisasi diharapkan mampu meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu, peneliti mencoba menghubungkan penerapan *good governance* dan pengendalian internal dengan kinerja pengelolaan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dan pengendalian internal dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara seperti yang terlihat digambar berikut ini: seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



F. Hipotesa

Adapun kerangka konseptual penelitian ini dibangun berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan dan hipotesis yang telah dirumuskan. Kerangka konseptual yang coba dibangun adalah sebagai berikut:

1. Garis H1 menghubungkan variabel *good governance* dengan variabel kinerja pengelolaan keuangan.

Didalam *United Nation Development Programme* (UNDP) prinsip-prinsip *good governance* yaitu terdiri dari *participation, rules of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, dan strategic vision*. Untuk dapat menjadi pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik, maka prinsip-prinsip *good governance* harus di terapkan dalam lingkup kinerja pemerintah daerah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rino Pandhu Wibowo (2018) yang menemukan bahwa penerapan prinsip *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah. Sehingga hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

H1 : *Good Governance* berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

2. Garis H2 menghubungkan variabel pengendalian internal dengan variabel kinerja pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah: “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur;

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Penelitian Nur Azlina dan Ira Amelia (2014), mengenai hubungan antara pengendalian internal dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik. Sehingga hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

H2 : Pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

3. Garis H3 menghubungkan variabel *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tercapainya kinerja pemerintahan yang baik tidak terlepas dari penerapan *good governance* dan pengendalian internal karena unsur-unsur *good governance* dan pengendalian internal sangat erat kaitannya dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Karlina Ghazalah Rahman (2016) menyimpulkan bahwa penerapan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah dan juga penelitian yang dilakukan oleh Andreas Wahyu Anggoro Putro (2018) dengan hasil penelitian adalah sistem pengendalian intern dan *Good Governance* berpengaruh terhadap kinerja. Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : *Good Governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian dirancang sebagai penelitian asosiatif dengan metode penelitian kuantitatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih.³⁷ Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mengetahui apakah penerapan *good governance* dan pengendalian internal sebagai variabel independen memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan BPKAD provinsi Sumatera Utara sebagai variabel dependen.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara yang berada di Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 30 Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2021.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpula elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan.³⁸ Populasi

³⁷ Suryani dan Hendrayani, *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Ekonomi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 119.

³⁸ Arfan Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan: Citapustaka Media, 2014), h. 105.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 123 pegawai.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut.³⁹ Ketika peneliti melakukan penarikan sampel, peneliti tentunya merasa tertarik dalam mengistimasi satu atau lebih nilai-nilai populasi atau menguji satu atau lebih hipotesis statistik. Pengambilan sampel ini dilakukan secara *non probability sampling*, yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang bertujuan dimana teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau penarikan sampel bertujuan.⁴⁰ Kriteria responden yang dipilih adalah pegawai yang terlibat pada bidang Akuntansi, bidang Pengelolaan Anggaran dan bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah di lingkungan BPKAD provinsi Sumatera Utara. Alasan dipilih karena pegawai tersebut yang memiliki peran secara teknis dalam kinerja pengelolaan keuangan BPKAD provinsi Sumatera Utara, Sampel terpilih sebanyak 60 orang pegawai.

Tabel 3.1

Jumlah Pegawai yang Terlibat pada bidang Akuntansi, bidang Pengelolaan Anggaran dan bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah di BPKAD Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Bidang Akuntansi	13
2.	Bidang Pengelolaan Anggaran	24
3.	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	23
Total		60

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara

³⁹ *Ibid.*, h. 106.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 115.

D. Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.⁴¹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena.⁴² Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban yang didapatkan langsung dari responden yaitu pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan dilakukan peneliti dengan cara membaca buku-buku pustaka dan membaca penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi agar menambah pengetahuan dan nantinya dapat menjawab rumusan masalah.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data pegawai BPKAD provinsi Sumatera Utara.

c. Metode kuisisioner

Metode kuisisioner digunakan peneliti agar peneliti mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Cara pengambilan data primer yang paling populer ialah dengan menggunakan kuisisioner yaitu, berupa jawaban responden terhadap item-item pernyataan yang terdapat dalam instrumen penelitian, yaitu variabel pertama penerapan *good governance* yang diukur dengan terlaksananya prinsip-prinsip *participation, transparency, rule of law, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountanbility*, dan

⁴¹ *Ibid.*, h. 18.

⁴² *Ibid.*, h. 122.

strategic vision. Variabel kedua penerapan pengendalian internal yang diukur dengan unsur-unsur di dalamnya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern serta variabel kinerja pengelolaan pemerintah daerah yang diukur dengan terwujudnya indikator *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara mendatangi secara langsung kantor BPKAD provinsi Sumatera Utara dan memberikan kuisisioner. Kuisisioner diberikan kepada pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara yang terlibat pada bidang Akuntansi, bidang Pengelolaan Anggaran dan bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Sampel terpilih sebanyak 60 orang responden. Kuisisioner yang diberikan berisi sejumlah pernyataan dimana setiap kuisisioner yang di berikan kepada para responden disertai surat permohonan pengisian kuisisioner.

Kuisisioner dalam penelitian ini mendefinisikan operasional variabel ke dalam indikatornya. Selanjutnya indikator tersebut dijabarkan ke dalam bentuk pernyataan, dan kemudian pemberian skor atas jawaban dari responden atas pernyataan-pernyataan yang ada. Untuk menentukan skor pada penelitian ini peneliti menggunakan skala *likert*. Skala *likert* merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang objek atau fenomena tertentu.⁴³ Dalam skala *likert* variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan ataupun pertanyaan.⁴⁴ Jawaban setiap item instrument akan dinilai menggunakan angka penilaian, yaitu:

⁴³ Azhari Akmal Tarigan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La Tansa Press, 2011), h. 83.

⁴⁴ Arfan Ikhsan dan Imam Ghazali, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Madju Medan Cipta, 2006), h. 138.

Tabel 3.2 Skor Jawaban Responden

Jenis Jawaban	Skor
Sangat tidak setuju (STS)	1
Tidak setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat setuju (SS)	5

F. Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan suatu defenisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria. Definisi operasional dapat berganti-ganti, tergantung pada tujuan peneliti dan cara peneliti memilih alat ukurnya.⁴⁵ Secara tidak langsung, definisi operasional itu mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai penyebabnya.⁴⁶ Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *good governance* dan pengendalian internal.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen.⁴⁷ Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja pengelolaan keuangan.

Definisi operasional penelitian ini dapat di gambarkan pada tabel berikut:

⁴⁵ Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian*, h. 70.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 67.

⁴⁷ *Ibid.*

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
<i>Good Governance</i> (X ₁)	<i>Good Governance</i> didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. ⁴⁸ <i>Good governance</i> dalam penelitian ini menekankan pada faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah daerah dalam hal ini kinerja pengelolaan keuangan daerah.	1. <i>Participation</i> (Partisipasi), 2. <i>Rules of law</i> (Penegakan hukum), 3. <i>Transparency</i> (Transparansi), 4. <i>Responsiveness</i> (Responsif), 5. <i>Consensus orientation</i> (Orientasi Kesepakatan), 6. <i>Equity</i> (Kesetaraan), 7. <i>Efficiency and Effectiveness</i> (Efisiensi dan Efektivitas), 8. <i>Accountability</i> (Akuntabilitas), 9. <i>Strategic vision</i> (Visi Strategis). ⁴⁹	<i>Likert</i>
Pengendalian Internal (X ₂)	Pengendalian Internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh	1. Lingkungan Pengendalian, 2. Penilaian Resiko, 3. Kegiatan Pengendalian,	

⁴⁸ Mardiasmo, *Akuntansi*, h. 18.

⁴⁹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, h. 24.

	dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.⁵⁰ Pengendalian internal dalam penelitian ini menekankan pada perencanaan dan pengendalian yang sudah disiapkan sehingga mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.	4. Informasi dan Komunikasi, 5. Pemantauan Pengendalian Internal.⁵¹	<i>Likert</i>
Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	Kinerja Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pencatatan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.⁵² Kinerja pengelolaan	1. Ekonomi, 2. Efisiensi, 3. Efektivitas.⁵³	<i>Likert</i>

⁵⁰ Sukrisno, *Auditing Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik* (Jilid I), h. 79.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, h. 4.

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, h. 3.

⁵³ Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 161.

	keuangan daerah dalam penelitian ini adalah seluruh aktivitas keuangan yang berhubungan dengan indikator pengukurannya.		
--	---	--	--

Sumber: diolah dari berbagai referensi

G. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dari sampel yang diharapkan dapat menggambarkan karakteristik dari populasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisa dari data tersebut dengan melakukan uji terhadap hipotesis yang telah dibuat dalam tahapan sebelumnya. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik dengan menggunakan bantuan program *IBM SPSS Statistic 20*. Tahapan analisa data merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan secara terstruktur.⁵⁴

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam deskriptif antara lain berupa frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), despersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif tergantung pada skala tipe pengukuran *construct* yang digunakan dalam penelitian.⁵⁵

2. Uji Kualitas Data

Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *good governance* dan pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, instrumen perlu di uji validitas dan reabilitas, maka:

⁵⁴ Sujoko Efferin, *et. al.*, *Metode Penelitian Akuntansi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.115-116.

⁵⁵ Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian*, h. 150.

a. Uji validitas (*Validity Test*)

Uji validitas adalah akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda. Validitas dalam penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.⁵⁶ Jika nilai $r_{hitung} < \text{nilai } r_{tabel}$, maka item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai $r_{hitung} > \text{nilai } r_{tabel}$ maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Bagi item yang tidak valid, maka item yang memiliki nilai r_{hitung} yang paling kecil dikeluarkan dan dilakukan analisis yang sama sampai semua item dinyatakan valid.⁵⁷

b. Uji Reliabilitas (*Reliability Test*)

Suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur itu mantap, dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Suatu alat ukur yang baik tidak berubah-ubah pengukurannya dan dapat diandalkan karena penggunaan alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa, selanjutnya member aspek ketepatan atau akurasi. Ukuran yang akurat adalah ukuran yang sesuai dengan yang ingin di ukur. Jika kedua aspek di atas yaitu aspek stabilitas dan aspek akurasi digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut mantap dan dapat mengukur secara cermat dan tepat. Suatu alat ukur juga harus sedemikian rupa sifatnya, sehingga kesalahan yang terjadi, yaitu kesalahan pengukuran yang random sifatnya dapat di tolerir.⁵⁸ Untuk mempermudah dalam analisis data, uji validitas dan reliabilitas dapat dilakukan dengan bantuan program komputer, yaitu program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Pengujian reliabilitas dapat mengacu pada nilai *Cronbach Alpha* (α), dimana suatu

⁵⁶ Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian*, h. 158.

⁵⁷Suci Derma Juita, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”, (Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013), h. 6.

⁵⁸ Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian*, h. 160.

konstruk atau variabel dinyatakan realibel apabila memiliki *Cronbach Alpha* (α) > 0,7. Rumus uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum ab^2}{at^2} \right)$$

Keterangan:

r = Reliabilitas Instrumen

at^2 = Varians Total

k = Banyak butir pertanyaan atau bank soal

$\sum ab^2$ = Jumlah Varian butir⁵⁹

3. Uji Asumsi Klasik

Peneliti melakukan uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam metode *Ordinary Least Square* (OLS).⁶⁰ Sedikitnya terdapat empat uji asumsi yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi linier sederhana, yaitu:

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak hanya dengan melihat pada histogram residual apakah memiliki bentuk seperti “lonceng” atau tidak.⁶¹ Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal, sedangkan distribusi normal dapat diketahui dengan melihat penyebaran data statistik pada

⁵⁹ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h. 75.

⁶⁰ Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian*, h. 185.

⁶¹ *Ibid.*, h. 186.

sumbu diagonal dari grafik distribusi normal.⁶² Ada dua cara mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak dengan:

1) Analisis Grafik

Analisis grafik yang digunakan untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan grafik histogram dan probability plot. Grafik histogram digunakan untuk membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Kemudian probability plot digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dan distribusi normal.⁶³ Dasar pengambilan keputusan uji normalitas:

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.⁶⁴
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.⁶⁵

2) Analisis Statistik

Adanya keraguan atas hasil analisis grafik uji normalitas, maka digunakan uji analisis statistik untuk memastikan hasil uji normalitas data. Menurut Ghozali (2011) uji statistik digunakan untuk lebih meyakinkan bahwa data yang digunakan

⁶² Mentari Nia Saputri, “Analisis Struktur Modal Dan Kebijakan Dividen Serta Pengaruhnya Pada Harga Saham Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2009-2013”, (Skripsi, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2015), h. 46.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

terdistribusi dengan normal. Analisis statistik menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S). Uji ini dapat dilihat dengan membandingkan Z hitung dengan Z tabel, dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Jika Z hitung (*Kolmogorov Smirnov*) < Z table (1,96), atau angka signifikan > taraf signifikansi (α) 0,05; maka distribusi data dikatakan normal.
- b) Jika Z hitung (*Kolmogorov Smirnov*) > Z table (1,96), atau angka signifikan < taraf signifikansi (α) 0,05 distribusi data dikatakan tidak normal.⁶⁶

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesaalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada period t-1 (sebelumnya).⁶⁷ Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.⁶⁸ Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu:

Tabel 3.4 Nilai Durbin Waston (DW)

Nilai Durbin Waston (DW)	Kesesuaian
Jika nilai D-W dibawah -2	Ada autokorelasi positif
Jika nilai D-W antara -2 sampai +2	Tidak ada autokorelasi
Jika nilai D-W diatas +2	Ada autokorelasi negatif

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 48.

⁶⁷ Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian*, h. 186.

⁶⁸ Laura Amelya, “ Pengaruh Komitmen Organisasional, Motivasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Manajerial pada Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru”, (*Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol.4 No. 1, 2017), h. 345.

Jika terjadi korelasi kuat, terdapat masalah multikolinearitas yang harus diatasi.⁶⁹ Untuk melihat adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* adalah mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah *Tolerance* < 0,1 sedangkan *Variance Inflation Factor* (VIF) > 5.⁷⁰ Suatu model regresi tidak boleh terdapat multikolinearitas.⁷¹

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas.⁷² Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distandardized. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas adalah:

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian

⁶⁹ Husein Umar, *Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 82.

⁷⁰ Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lufti, *Analisis Data* (Medan: USU Press, 2001), h. 153.

⁷¹ Wibowo, *Pengaruh Penerapan Good Governance*, h. 36.

⁷² Husein Umar, *Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 82.

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.⁷³

- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.⁷⁴

4. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*) digunakan untuk memahami sebuah fenomena yang mempengaruhi kondisi dari variabel dependen (Y), karena hampir semua kondisi yang berpengaruh terhadap suatu faktor, disebabkan oleh lebih dari satu faktor independen (X).⁷⁵

Adapun model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Kinerja Pengelolaan Keuangan
X1	= <i>Good Governance</i>
X2	= Pengendalian Internal
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi masing-masing variabel
α	= Konstanta
e	= Variabel Gangguan (<i>error</i>)

5. Uji Hipotesis Penelitian

Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis dengan menguji:

a. Mencari Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

⁷³ Saputri, *Analisis Struktur Modal*, h. 53.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 54.

⁷⁵ Efferin, *et. al.*, *Metode Penelitian Akuntansi*, h. 211.

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtutan waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.⁷⁶

b. Uji Statistik t (t-test)

Uji statistik adalah uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak di uji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau $H_0 : \beta_i = 0$. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.⁷⁷ Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a: \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- 1) *Quick Look*: bila jumlah *degree of freedom* adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independe secara individual mempengaruhi variabel dependen.⁷⁸
- 2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi

⁷⁶ Ikhsan, *et. al.*, *Metodologi Penelitian*, h. 200.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 199.

⁷⁸ *Ibid.*

dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.⁷⁹

Dalam pengujian ini criteria pengambilan keputusan yaitu:

Ho diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Ho ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

c. Uji Statistik F (F test)

Uji statistik F merupakan (F test) merupakan uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_1 \neq 0, b_2 \neq 0, \dots, b_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistik F dengan criteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) *Quick Look*: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 yang menyatakan $b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai statistik F hitung dengan nilai F tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatera* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administrative yang disebut Keresidenan, yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I) No.10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I Nomor 22 /Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara diiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang No.5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang-Undang R.I No.24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Motto Daerah, adalah Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya.

Sementara BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Provinsi Sumatera Utara adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang baru dibentuk berdasarkan tindak lanjut Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan pergantian nama yang baru di kantor Gubernur Sumatera Utara. Sebelum berganti nama menjadi BPKAD adalah dulunya dinamakan Biro Keuangan. Sedangkan ASN (Aparatur Sipil Negara) terdiri dari eks Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setda Provinsi Sumatera Utara dan sebagian berada di Biro Umum.

2. Visi dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera Utara

a. Visi BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Professional, Akuntabel dan Transparan, Berbasis Teknologi Informasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Misi BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Untuk merealisasikan visi dan memberikan kebijakan tentang tujuan yang akan diwujudkan, serta untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta memantapkan etos kerja, maka misi BPKAD Provsu adalah:

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme disiplin aparatur dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berbasis teknologi informasi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring,

evaluasi dan pengendalian Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.

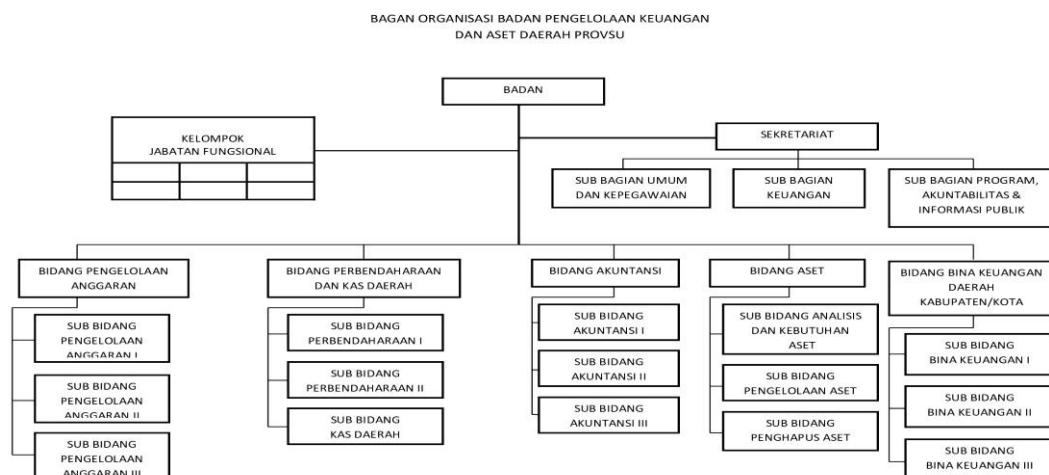
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan Aset.
- 2) Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 4) Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPKAD provinsi Sumatera Utara

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan, jumlah kuisioner yang di bagikan adalah sebanyak 60 kuisioner. Semua kuisioner dikembalikan kepada peneliti dan semua data dapat diolah dengan persentase 100%. Berikut gambaran mengenai kuisioner dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Jumlah kuisioner yang di bagikan	60	100 %
2.	Jumlah kuisioner yang kembali	60	100 %
3.	Jumlah kuisioner yang dapat diolah	60	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2020

1. Analisis Statistik Deskriptif

a. Analisis Deskriptif Responden

Analisis deskriptif dalam penelitian ini merupakan uraian atau penjelasan pengumpulan data primer yang diperoleh dari hasil pemberian kuisioner kepada responden. Pada penelitian ini terdapat 9 butir pernyataan untuk variabel X1, 9 butir pernyataan untuk variabel X2 dan 9 butir pernyataan untuk variabel Y. Jumlah keseluruhan pernyataan adalah 27 pernyataan. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat pada bidang Akuntansi, bidang Pengelolaan Anggaran dan bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah di lingkungan BPKAD provinsi Sumatera Utara sebanyak 60 orang pegawai.

Berdasarkan pengumpulan data, berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan dan masa kerja:

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	35	58,3%
2.	Perempuan	25	41,7 %
Total		60	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 35 orang dengan persentase sebanyak 58,3 sedangkan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang dengan tingkat persentase sebanyak 41,7%. Maka dari itu, responden terbanyak dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 35 orang.

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	21-30	11	18,33%
2.	31-40	15	25%
3.	41-50	19	31,67%
4.	51-60	15	25%
Total		60	100%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut, sebagian besar responden berusia 41-50 tahun sebanyak 19 orang dengan persentase 31,67%. Selanjutnya diikuti usia 31-40 tahun dan usia 51-60 tahun dengan masing-masing sebanyak 15 orang , dengan persentase masing-masing 25%, serta usia 21-30 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase 18,33%. Maka dari itu, responden terbanyak dengan usia 41-50 sebanyak 19 orang.

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	SMP/SMA	13	21,67%
2.	Diploma	3	5%
3.	S1	39	65%
4.	S2	5	8,33%
5.	S3	0	0%
Total		60	100%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dapat diketahui berdasarkan Tabel 4.4 bahwa dari 60 responden dengan tingkat persentase 100% sebanyak 13 responden dengan tingkat persentase 21,67% berpendidikan SMP/SMA. Sebanyak 3 responden dengan tingkat persentase 5% berpendidikan Diploma. Sebanyak 39 responden dengan tingkat persentase 65% berpendidikan Strata-1 (S1). Kemudian sebanyak 5 responden dengan tingkat persentase 8,33% berpendidikan Strata-2 (S2). Maka dari itu, jumlah sampel terbanyak yaitu responden dengan tingkat pendidikan Strata-1 (S1).

4) Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Akuntansi	10	16,67%
2.	Manajemen	6	10%
3.	Ilmu Ekonomi	17	28,33%
4.	Sosial	2	3,33%
5.	Hukum	2	3,33%
6.	Teknik	3	5%
7.	Lainnya	20	33,34%
Total		60	100%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dapat dilihat dari Tabel 4.5 responden dengan latar belakang pendidikan lainnya sebanyak 20 orang dengan tingkat persentase 33,34%. Selanjutnya diikuti dengan responden dengan latar belakang pendidikan Ilmu Ekonomi sebanyak 17 orang dengan tingkat persentase 28,33%, Akuntansi 10 orang dengan tingkat persentase 16,67%, Manajemen 6 orang dengan tingkat persentase 10%, Teknik 3 orang dengan tingkat persentase 5% serta sosial dan hukum masing-masing sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase masing-masing sebanyak 3,33%. Maka dari itu, responden terbanyak yaitu responden berlatar belakang pendidikan lainnya yaitu sebanyak 21 orang.

5) Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No.	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1.	< 5 Tahun	7	11,67%
2.	6-15 Tahun	32	53,33%
3.	16-25 Tahun	4	6,67%
4.	26-35 Tahun	17	28,33%
Total		60	100%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, mayoritas responden memiliki masa kerja 6-15 tahun sebanyak 32 orang dengan persentase 53,33%. Selanjutnya, diikuti dengan masa kerja 26-35 tahun sebanyak 17 orang dengan tingkat persentase 28,33%. Responden dengan masa kerja <5 Tahun sebanyak 7 orang dengan tingkat persentase 11,67% dan responden 16-25 tahun sebanyak 6,67%. Maka dari itu, responden terbanyak yaitu responden yang mempunyai masa kerja 6-15 tahun.

b. Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Variabel

		Statistics		
		Good Governance	Pengendalian Internal	Kinerja Pengelolaan Keuangan
N	Valid	60	60	60
	Missing	0	0	0
Mean		63,4500	34,0167	32,7667
Median		64,5000	33,5000	34,5000
Mode		86,00	30,00	36,00
Sum		3807,00	2041,00	1966,00

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, Agustus 2020 (data diolah)

Hasil analisis output diatas menjelaskan:

- 1) Jumlah data (N) masing-masing pada variabel *Good Governance*, Pengendalian Internal dan Kinerja Pengelolaan Keuangan adalah 60 data dan semuanya dinyatakan valid. Ini berarti tidak ada data yang tidak valid/hilang (*missing*).
- 2) Nilai Rata-rata (*mean*) dari variabel *Good Governance* adalah sebesar 63,4500 dan variabel Pengendalian Internal sebesar 34,0167 sedangkan variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar 32,7667.
- 3) Nilai tengah (*median*) dari variabel *Good Governance* adalah sebesar 64,5000 dan variabel Pengendalian Internal sebesar 33,5000 sedangkan variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar 34,5000.
- 4) Nilai yang sering muncul (*mode*) dari variabel *Good Governance* adalah sebesar 86,00 dan variabel Pengendalian Internal sebesar 30,00 sedangkan variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar 36,00.
- 5) Jumlah data (*sum*) dari variabel *Good Governance* adalah sebesar 3807,00 dan variabel Pengendalian Internal sebesar 2041,00 sedangkan variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar 1966,00.

2. Uji Kualitas Data

Peneliti ingin mengukur kuisioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka kuisioner yang disusun perlu di uji validitas dan reabilitasnya.

a. Uji Validitas (*Validity Test*)

Bila suatu alat ukur sudah dikatakan valid, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian reliabilities alat ukur. Sebaliknya bila alat ukur dikatakan tidak valid, maka alat ukur yang telah digunakan sebelumnya harus dievaluasi atau diganti dengan alat ukur yang lebih tepat / efektif. Pengujian validitas instrumen dengan menggunakan SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

$$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}} = \text{Valid}$$

$$r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}} = \text{Tidak Valid}$$

r_{tabel} dengan jumlah responden sebanyak 30 orang maka nilainya adalah sebesar 0.361. Jika r_{hitung} lebih besar dari 0.361 maka kuisioner yang digunakan dinyatakan valid.

1) Uji Validitas Variabel *Good Governance* (X_1)

Tabel 4.8 Uji Validitas *Good Governance* (X_1)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
1	0,463	0,361	Valid
2	0,574	0,361	Valid
3	0,393	0,361	Valid
4	0,657	0,361	Valid
5	0,637	0,361	Valid
6	0,809	0,361	Valid
7	0,612	0,361	Valid
8	0,808	0,361	Valid
9	0,475	0,361	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, Agustus 2020 (data diolah)

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan telah valid karena $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$. Dan pernyataan yang memiliki nilai tertinggi adalah pernyataan 6 (0.809) dan nilai terendah adalah pernyataan 3 (0.393). Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa semua pernyataan tersebut valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

2) Variabel Pengendalian Internal (X_2)

Tabel 4.9 Uji Validitas Pengendalian Internal (X_2)

Pernyataan	r hitung	r tabel	Status
1	0,847	0,361	Valid
2	0,391	0,361	Valid
3	0,631	0,361	Valid
4	0,532	0,361	Valid
5	0,600	0,361	Valid
6	0,798	0,361	Valid
7	0,673	0,361	Valid
8	0,854	0,361	Valid
9	0,610	0,361	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, Agustus 2020 (data diolah)

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan telah valid karena r hitung $>$ r tabel. Dan pernyataan yang memiliki nilai tertinggi adalah pernyataan 8 (0.854) dan nilai terendah adalah pernyataan 2 (0.391). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan tersebut valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

3) Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)

Tabel 4.10 Uji Validitas Pengendalian Internal (Y)

Pernyataan	r hitung	r tabel	Status
1	0,425	0,361	Valid
2	0,699	0,361	Valid
3	0,568	0,361	Valid
4	0,614	0,361	Valid
5	0,720	0,361	Valid
6	0,837	0,361	Valid
7	0,683	0,361	Valid
8	0,537	0,361	Valid
9	0,785	0,361	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, Agustus 2020 (data diolah)

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan telah valid karena r hitung $>$ r tabel. Dan pernyataan yang memiliki nilai tertinggi adalah pernyataan 6 (0.837) dan nilai terendah adalah pernyataan 1 (0.425). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan tersebut valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

b. Uji Reabilitas (*Reliability Test*)

Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk mengukur nilai sebenarnya dari suatu konstruk dapat dilihat dengan *rule of thumbs* dengan nilai α (α) $>$ 0,70 maka dapat dikatakan realibel. Adapun hasil uji reabilitas yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Good Governance</i> (X_1)	0,837	0,70	Realible
Pengendalian Internal (X_2)	0,773	0,70	Realible
Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	0,882	0,70	Realible

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, Agustus 2020 (data diolah)

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa :

- 1) Uji Reabilitas Variabel *Good Governance* (X_1) dengan koefisien alpha (Cronbach's Alpha) adalah sebesar 0.837, ini berarti *Cronbach Alpha* (α) $>$ 0,70 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel *Good Governance* (X_1) telah reliable dan layak dijadikan sebagai instrumen penelitian.
- 2) Uji Reabilitas Variabel Pengendalian Internal (X_2) dengan koefisien alpha (Cronbach's Alpha) adalah sebesar 0.773, ini berarti *Cronbach Alpha* (α) $>$ 0,70 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Pengendalian Internal (X_2) telah reliable dan layak dijadikan sebagai instrumen penelitian.

- 3) Uji Reabilitas Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y) dengan koefisien alpha (Cronbach's Alpha) adalah sebesar 0.882, ini berarti *Cronbach Alpha* (α) > 0,70 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y) telah reliable dan layak dijadikan sebagai instrumen penelitian.

3. Uji Asumsi Klasik

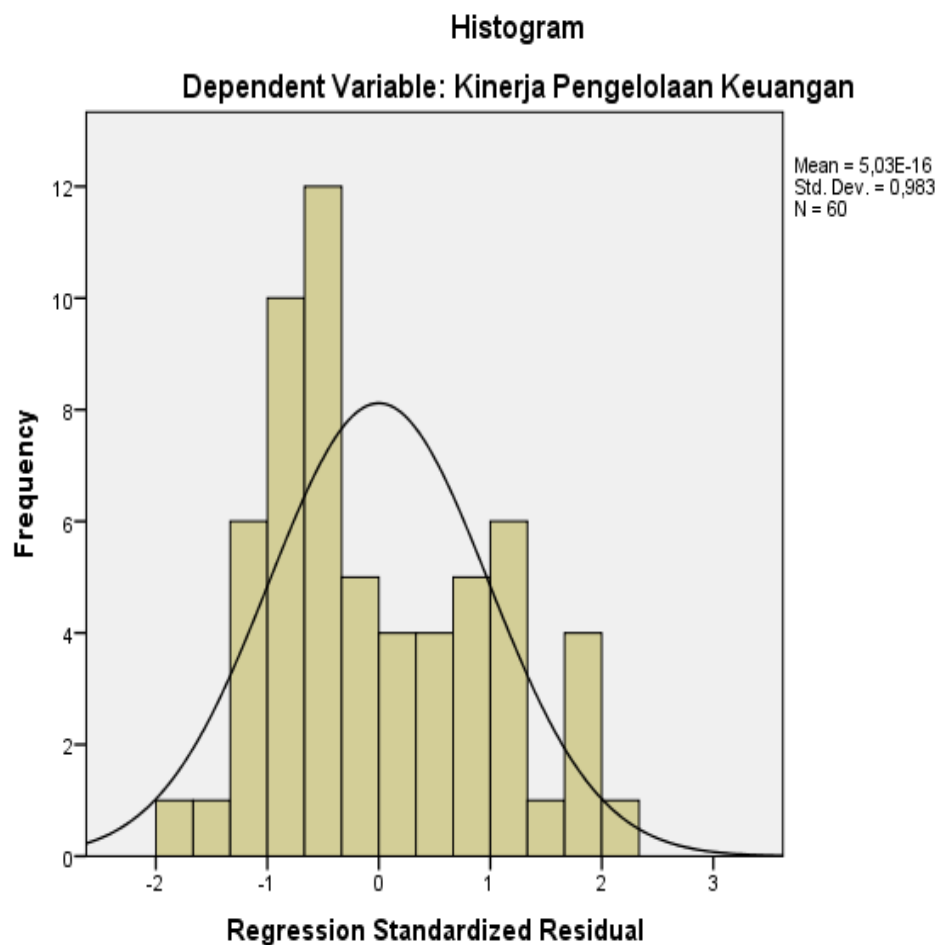
a. Uji Normalitas data

1) Analisis grafik

Analisis grafik yang digunakan untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan grafik histogram dan probability plot.

a. Pendekatan Histogram

Gambar 4.2 Histogram



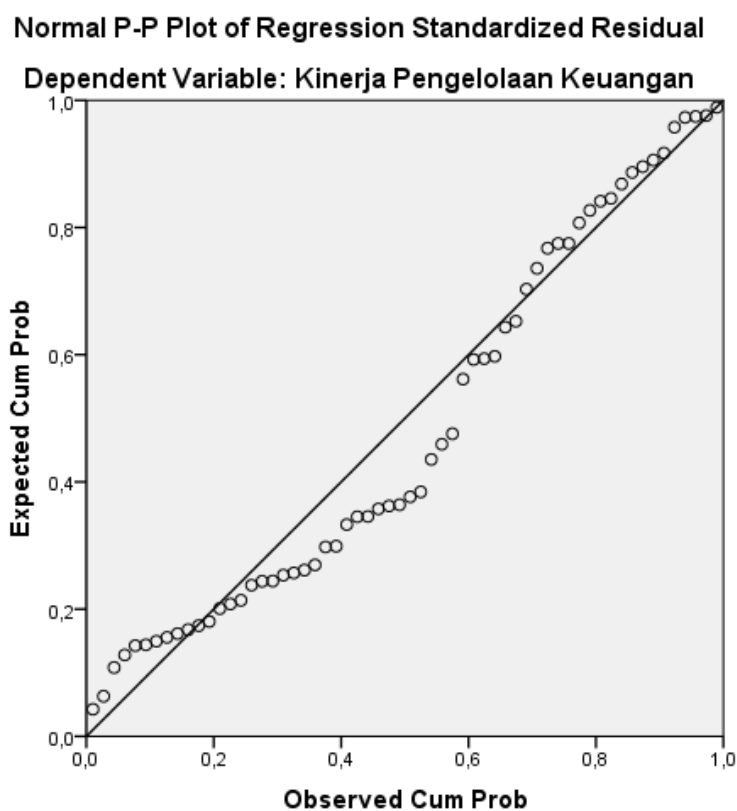
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, September 2020 (data diolah)

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal hal ini ditunjukkan oleh distribusi data tersebut tidak menceng ke kanan maupun ke kiri.

b. Pendekatan P- Plot

Gambar 4.3

Pendekatan Normalitas P- Plot



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, September 2020 (data diolah)

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa grafik plot terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan tidak ada data yang menjolok jauh sehingga data ini memiliki distribusi normal. Dan untuk memastikan apakah data di sepanjang garis diagonal berdistribusi normal maka dilakukan analisis statistik menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S)

2) Analisis Statistik

Tabel 4.12
Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,95253289
	Absolute	,151
Most Extreme Differences	Positive	,151
	Negative	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		1,170
Asymp. Sig. (2-tailed)		,129

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, September 2020 (data diolah)

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,129 lebih besar dari nilai signifikan (0,05) atau $0,129 > 0,05$. Dengan kata lain variabel residual berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin Waston* (DW) dengan ketentuan :

- 1) Jika nilai DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- 2) Jika nilai DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika nilai DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

Tabel 4.13 Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,763 ^a	,581	,567	3,00389	1,009

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Good Governance

b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, September 2020 (data diolah)

Dari hasil pengolahan data autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin Waston* terletak di antara -2 sampai +2 = $-2 < 1,009 < 2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Suatu model regresi tidak boleh terdapat multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Varian Inflation Factors* (VIF). Nilai yang dipakai untuk nilai *Tolerance* $< 0,1$ sedangkan *Varian Inflation Factors* (VIF) > 5 .

Tabel 4.14
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3,751	3,894		,963	,340		
Good Governance	,075	,023	,326	3,308	,002	,755	1,325
Pengendalian Internal	,713	,129	,546	5,539	,000	,755	1,325

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, September 2020 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa

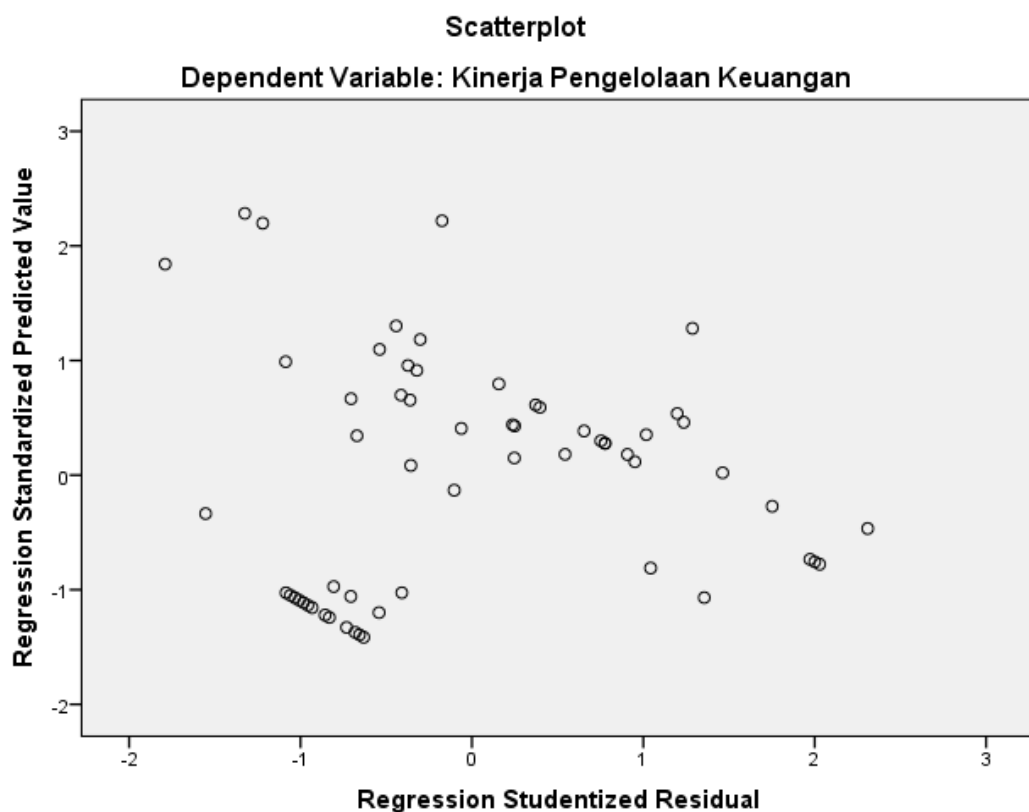
- Variabel *Good Governance* tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* = $0,755 > 0,1$ dan nilai *VIF* = $1,325 < 5$.
- Variabel *Pengendalian Internal* tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* = $0,755 > 0,1$ dan nilai *VIF* = $1,325 < 5$.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain

tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut:

Gambar 4.4 Scatterplot



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, September 2020 (data diolah)

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen, berdasarkan masukan variabel independennya.

4. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*) digunakan untuk memahami sebuah fenomena yang mempengaruhi kondisi dari variabel dependen

(Y), karena hampir semua kondisi yang berpengaruh terhadap suatu faktor, disebabkan oleh lebih dari satu faktor independen (X). Yang nantinya berguna untuk dapat mengetahui pengaruh positif atau negatif faktor-faktor tersebut. Dengan model persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut:

Tabel 4.15
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,751	3,894		,963	,340
1 Good Governance	,075	,023	,326	3,308	,002
1 Pengendalian Internal	,713	,129	,546	5,539	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, September 2020 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data tabel 4.15 kolom (*Unstandardized Coefficients*) bagian B diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,751 + 0,075 X_1 + 0,713 X_2$$

Pada persamaan tersebut maka diuraikan sebagi berikut:

- a. Nilai konstanta $\alpha = 3,751$ artinya apabila skor variabel *Good Governance* dan Pengendalian Internal sama dengan nol, maka Kinerja Pengelolaan Keuangan naik sebesar 3,751.
- b. Koefisien regresi X_1 (*Good Governance*) = 0,075 menunjukkan bahwa variabel *Good Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y), artinya jika variabel

Good Governance meningkat satu maka Kinerja Pengelolaan Keuangan akan meningkat sebesar 0,075.

- c. Koefisien regresi X_2 (Pengendalian Internal) = 0,713 menunjukkan bahwa berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y), artinya jika variabel Pengendalian Internal meningkat satu maka Kinerja Pengelolaan Keuangan akan meningkat sebesar 0,713.

5. Uji Hipotesis Penelitian

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol sampai dengan satu, $0 < R^2 < 1$.

Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,763 ^a	,581	,567	3,00389

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Good Governance

b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, September 2020 (data diolah)

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa:

Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,567 angka ini menunjukkan bahwa sebesar 56,7% Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y) dapat dipengaruhi oleh *Good Governance* (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) sedangkan sisanya 43,3 % dipengaruhi dengan faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji Statistika t (*t-test*)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan, yaitu:

Ho diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Ho ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Dalam penelitian ini diketahui jumlah sampel (n) adalah 60 orang dan jumlah keseluruhan variabel (k) adalah 3 sehingga diperoleh:

Derajat bebas (Df) = $n - k = 60 - 3 = 57$

Diperoleh nilai t_{tabel} pada tingkat $\alpha = 5\%$ (57) = 2,002

Berikut merupakan hasil pengujian uji-T pada Tabel 4.17, yaitu:

**Tabel 4.17 Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,751	3,894		,963	,340
Good Governance	,075	,023	,326	3,308	,002
Pengendalian Internal	,713	,129	,546	5,539	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, September 2020 (data diolah)

Tabel 4.17 menunjukkan nilai t_{hitung} yang diperoleh dari masing-masing variabel yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Variabel *Good Governance* (X_1) memiliki t_{hitung} sebesar 3,308 dengan tingkat signifikan 0,002. Sedangkan t_{tabel} adalah sebesar 2,002. Oleh karena itu $t_{hitung} (3,308) > t_{tabel} (2,002)$ dan tingkat signifikansinya $0,002 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Good Governance* secara individual atau secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. Artinya jika ditingkatkan variabel *Good Governance* maka Kinerja Pengelolaan Keuangan akan meningkat.

- b. Variabel Pengendalian Internal (X_2) memiliki t_{hitung} sebesar 5,539 dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan t_{tabel} adalah sebesar 2,002. Oleh karena itu $t_{hitung} (5,539) > t_{tabel} (2,002)$ dan tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengendalian Internal secara individual atau secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. Artinya jika ditingkatkan variabel Pengendalian Internal maka Kinerja Pengelolaan Keuangan akan meningkat.

c. Uji Statistik F (F test)

Uji F digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini diketahui jumlah sampel (n) adalah 60 orang dan jumlah keseluruhan variabel (k) adalah 3 sehingga diperoleh:

- $Df (\text{Pembilang}) = k - 1 \rightarrow 3 - 1 = 2$
- $Df (\text{Penyebut}) = n - k \rightarrow 60 - 3 = 57$

Diperoleh nilai F_{tabel} pada tingkat $\alpha = 5\%$ (2:57) = 3,1588. Berikut ini merupakan hasil pengujian uji F pada Tabel 4.18:

4.18 Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	714,404	2	357,202	39,586	,000 ^b
Residual	514,330	57	9,023		
Total	1228,733	59			

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Good Governance

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, September 2020 (data diolah)

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} adalah 39,586 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan F_{tabel} adalah 3,1588. Dari hasil tersebut $F_{hitung} (39,586) > F_{tabel} (3,1588)$ dan tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Good Governance* (X_1), Pengendalian Internal

(X₂) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara”. Diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan *Good Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ sedangkan nilai t_{hitung} sebesar $(3,308) > t_{tabel} (2,002)$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Good Governance* (X₁) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y). Dari hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa Ha₁ diterima dan H0₁ ditolak, variabel *Good Governance* (X₁) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y). Dari hasil pengujian diatas juga membuktikan membuktikan bahwa Ha₁ diterima dan H0₁ ditolak. Dalam hal ini pernyataan Peraturan Daerah dan kebijakan publik lainnya disusun demi kepentingan masyarakat mendapatkan jawaban setuju dari mayoritas responden sehingga akan meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan diterapkannya *Good Governnace* yang berkaitan dengan prinsip transparansi, prinsip partisipasi, prinsip pengawasan, prinsip akuntabilitas, prinsip daya tanggap, prinsip profesionalisme, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip kesetaraan, prinsip wawasan ke depan dan prinsip penegakan hukum menciptakan kinerja pengelolaan keuangan BPKAD yang efisien, ekonomis dan efektif. *Good Govenance* atau upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu unsur yang mencerminkan keinginan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah demi

kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna serta berhasil guna.

Meskipun dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh secara signifikan, BPKAD Provinsi Sumatera Utara harus terus meningkatkan *Good Governance* sehingga akan membuat Kinerja Pengelolaan Keuangan lebih baik lagi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan variabel *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian oleh Andreas Wahyu Anggoro Putro (2018) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan *Good Governance* Terhadap Kinerja di Pemerintah Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

2. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa variabel Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. Hal ini terlihat dari signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$ sedangkan nilai t_{hitung} sebesar $5,539 > t_{tabel} 2,002$. Dari hasil pengujian diatas juga membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Dalam hal ini pernyataan bahwa dalam penerapan pengendalian internal pimpinan selalu mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan mendapatkan jawaban setuju dari mayoritas responden sehingga hal ini akan meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Sunarmo, dkk (2018) dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Government Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi SDM Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan *good governance* dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan yaitu dilihat dari F_{hitung} 39,586 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan F_{tabel} adalah 3,1588. Dari hasil tersebut F_{hitung} (39,586) > F_{tabel} (3,1588) dan tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$. Dari hasil pengujian diatas juga membuktikan bahwa bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Dalam hal ini berarti *good governance* dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Dapat dikatakan bahwa penerapan *good governance* dan pengendalian internal sudah diterapkan dengan baik pada kinerja pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan:

1. *Good Governance* Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar $(3,308) > t_{tabel} (2,002)$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Good Governance* (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. Dapat dikatakan bahwa *Good Governance* sudah diterapkan dengan baik dalam meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

2. Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar $5,539 > t_{tabel} 2,002$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengendalian Internal (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Dapat dikatakan bahwa Pengendalian Internal sudah dijalankan dengan baik dalam meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

3. *Good Governance* dan Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Hal ini dapat dilihat dari nilai dari hasil F_{hitung} sebesar $(39,586) > F_{tabel} (3,1588)$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Good Governance* (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja

Pengelolaan Keuangan (Y), sehingga membuktikan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Dapat dikatakan bahwa *Good Governance* dan Pengendalian Internal sudah diterapkan dengan baik dalam meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya saran-saran yang dapat disampaikan penulis melalui hasil penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan *Good Governance* baik perseorangan maupun kelompok dengan cara yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh organisasi, dan lebih memperhatikan serta meningkatkan pengendalian internal melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan agar Kinerja Pengelolaan Keuangan BPKAD semakin efisien, ekonomis dan efektif.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas area penelitian dan menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Hal ini diperlukan untuk terus meningkatkan akurasi hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang dapat lebih sempurna dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelya, Laura. “Pengaruh Komitmen Organisasional, Motivasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial pada Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru”. Jurnal: Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol.4 No. 1, 2017.
- Azlina, Nur dan Ira Amelia. “Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan”. Jurnal: Akuntansi Universitas Jember. Vol.12 No. 2, 2014.
- Christy, Irene Sekar Lintang. “Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Skripsi: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma. 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Syaamil Cipta Media. 2005.
- Efferin, Sujoko., Darmadji, Stevanus Hadi dan Tan, Yusliawati. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Fahmi, Irham. *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Harahap, Sunarji. *Pengantar Manajemen: Pendekatan Integratif Konsep Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2016.
- Harmain, Hendra., Nurlaila., Safrida, Lili., Sufitrayati., Alfurkaniati., Ermawati, Yana., Ikhsan, Arfan., Olivia, Hastuti., Jubi dan Nurwani. *Pengantar Akuntansi 1*. Medan: Madenatera. 2019.

[Http://medan.tribunnews.com/amp/2019/09/14/pejabat-bpkad-sumut-bantah-uang-yang-hilang-di-parkiran-pemprov-sumut-rp-16-miliar-untuk-hal-ini](http://medan.tribunnews.com/amp/2019/09/14/pejabat-bpkad-sumut-bantah-uang-yang-hilang-di-parkiran-pemprov-sumut-rp-16-miliar-untuk-hal-ini).

Diunduh pada tanggal 17 Januari 2020.

[Https://medan.tribunnews.com/am](https://medan.tribunnews.com/am). Diunduh pada tanggal 17 Januari 2020.

Ikhsan, Arfan dan Imam Ghozali. *Metodologi Penelitian*. Medan: Madju Medan Cipta. 2006.

Ikhsan, Arfan., Muhyarsyah., Tanjung, Hasrudy dan Oktaviani, Ayu. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Citapustaka Media. 2014.

Juita, Suci Derma. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”. Skripsi: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. 2013.

Khaddafi, Muammar., Hani, Syafrida., Putra, Arwansyah., Isnawati., Kamilah., Yunita, Nur Afni dan Nasution, Ilham Ramadhan. *Akuntansi Biaya*. Medan: Madenatera. 2017.

Lubis, Arnida Wahyuni. *Pemeriksaan Kinerja Sektor Publik*. Medan: Modul Pemeriksaan Kinerja Sektor Publik. 2018.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. 2002.

_____. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi. 2004.

Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. 2010.

Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran RI Tahun 2005 No. 58. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran RI Tahun 2008 No. 60. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putro, Andreas Wahyu Anggoro. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan *Good Governance* terhadap Kinerja di Pemerintah Kota Yogyakarta”. Skripsi: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. 2018.
- Rahman, Karlina Ghazalah. “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar”. Skripsi: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin Makassar. 2016.
- Riyanto, Slamet dan Hatmawan, Aglis Andhita. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Budi Utama. 2020.
- Saputri, Mentari Nia. “Analisis Struktur Modal Dan Kebijakan Dividen Serta Pengaruhnya Pada Harga Saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2013”. Skripsi: Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung. 2015.
- Setiawan, Budi. *Menganalisa Statistik Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 21*. Yogyakarta: Andi. 2013.
- Situmorang, Syafrizal Helmi dan Lufti, Muslich. *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press. 2001.
- Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.

- Sukrisno, Agoes. *Auditing Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jilid I. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004.
- Suryani dan Hendrayadi. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group. 2015.
- Tarigan, Azhari Akmal., Harahap, Isnaini., Soemitra, Andi., Nawawi, Zuhri M., Syakir, Ahmad dan Yusrizal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La Tansa Press. 2011.
- Tarigan, Azhari Akmal., Yafiz, Muhammad., Harahap, Isnaini., Marliyah., Batubara, Chuzaimah., Ridwan, M., Harahap, Nurlaila., Sugianto, Nawawi, Zuhri M., Syakir, Hermain, Hendra., Anggraini, Tuti., Rasyid, Aliyuddin Abd., Nasution, Yenni Samri J., Asriani dan Nurhani. *Buku Panduan Penulisan Skripsi FEBI, UIN-SU*. Medan. 2015.
- Taufik, Taufeni dan Dian Kemala. “Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip *Good Governance*, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik”. Jurnal: Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol.5 No. 1, 2013.
- Tunggal, Amin Widjaja. *Struktur Pengendalian Intern*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2003.
- Umar, Husein. *Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Wibowo, Rino Pandhu. “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa”.

Skripsi: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta. 2018

LAMPIRAN I

SURAT PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 - 1332 /BKB.P/VII/2020

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: B-2721/EB.I/KS.02/07/2020 Tanggal 21 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a.Nama : Novita Riyati Sukma
b.Alamat : Jl. Perjuangan Gg. Suka Maju No. 21 Medan
c.Pekerjaan : Mahasiswa
d.Nip/Nim/KTP : 0502161047
e.Judul : Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara..
- f.Lokasi/Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
- g.Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
h.Peserta : Sendiri
i.Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
a. Untuk pengawasan surat izin yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan 23 Juli 2020

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
KABID PENANGANAN KONFLIK DAN
KEWASPADAAN NASIONALBUDIANTO TAMBUNAN,SE,MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640526 199803 1 002**Tembusan**

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Ka Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Peringgal

SURAT TELAH SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Gedung Bank Sumut Lantai 7
Bpkadprovsu@gmail.com

MEDAN

Medan, 10 Agustus 2020

Nomor : 071/1502 /SKF-PET
Lampiran :
Perihal : Telah Selesai Penelitian.

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara
di -
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070-1332/BKB.P/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, Perihal Rekomendasi Penelitian dan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B-2721/EB.I/KS.02/07/2020 tanggal 21 Juli 2020, tentang Rekomendasi Penelitian atas nama :

Nama	: Novita Riyati Sukma
NIM	: 0502161047
Jurusan	: Akuntansi Syariah
Judul	: Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian, selanjutnya hasil penelitian tersebut dikirim kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIS,


Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670818 199401 1 002

LAMPIRAN II

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin* : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia :

Pendidikan Terakhir : ☐ SMP/SMA ☐ Diploma
☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Latar Belakang Pendidikan : a. Akuntansi ☐
b. Manajemen ☐
c. Ilmu Ekonomi ☐
d. Sosial ☐
e. Hukum ☐
f. Teknik ☐
g. Lainnya ☐

Jabatan :

Masa Kerja :

Bidang Pekerjaan* : ☐ Bidang Akuntansi
(*pilih salah satu) ☐ Bidang Pengelolaan Anggaran
☐ Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

B. Petunjuk Pengisian

Bapak, Ibu, Saudara/Saudari diminta memberikan tanda *checklist* (✓) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak, Ibu, Saudara/Saudari. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban. Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana setiap angka mewakili tingkat kesesuaian pernyataan yang tersedia dengan pendapat.

Keterangan	(STS) Sangat tidak setuju	(TS) Tidak setuju	(N) Netral	(S) Setuju	(SS) Sangat setuju
Skor	1	2	3	4	5

Penerapan Good Governance (X₁)

No	Daftar Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
	<i>Participation (Partisipasi)</i>					
1.	Adanya keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan					
	<i>Rules of law (Penegakan hukum)</i>					
2.	Peraturan Daerah dan kebijakan publik lainnya disusun demi kepentingan masyarakat					
	<i>Transparency (Transparansi)</i>					
3.	Data dan informasi yang menyangkut pengelolaan keuangan dapat diperoleh pengguna laporan tersebut demi kepentingan bersama					
	<i>Responsiveness (Responsif)</i>					
4.	Cepat dan tanggap menindaklanjuti kritik dan saran atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat					
	<i>Consensus orientation (Orientasi Kesepakatan)</i>					
5.	Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas					
	<i>Equity (Kesetaraan)</i>					
6.	Mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian layanan					

	<i>Efficiency and Effectiveness (Efisiensi dan Efektivitas)</i>					
7.	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara efisien dan efektif					
	<i>Accountability (Akuntabilitas)</i>					
8.	Adanya kelalaian dan kemunduran sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah					
	<i>Strategic vision (Visi Strategis)</i>					
9.	Pemerintah daerah menyusun visi dan misi yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan					
Sumber: Kuisioner dimodifikasi dari penelitian Karlina Ghazalah Rahman (2016).						

Pengendalian Internal (X₂)

No	Daftar Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
	<i>Lingkungan Pengendalian</i>					
1.	Instansi memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi					
2.	Instansi mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan kepada hukum yang berlaku serta pencatatan pembukuan akuntabilitas pembayaran sudah mengikuti standar baku keuangan yang disyaratkan.					
	<i>Penilaian Risiko</i>					
3.	Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pedekatan dalam mengelola dan mengendalikan risiko berdasarkan berapa banyak risiko yang dapat diterima					
4.	Setiap risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis dicatat dalam daftar risiko					
	<i>Kegiatan Pengendalian</i>					
5.	Dilakukan peninjauan secara berkala atas kinerja pada setiap					

	bagian dan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal apabila diperlukan.					
6.	Melakukan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting					
	Informasi dan Komunikasi					
7.	Pimpinan selalu mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan					
8.	Informasi sangat penting untuk memungkinkan setiap orang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengendalian yang dibebankan kepadanya					
	Pemantauan Pengendalian Intern					
9.	Pemantauan pengendalian intern masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai					
Sumber: Kuisisioner dimodifikasi dari penelitian: Rino Pandhu Wibowo (2018).						

Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)

No	Daftar Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
	Ekonomi					
1.	Anggaran dikelola dengan konsep <i>Value for Money</i> yaitu memanfaatkan uang sebaik mungkin dan berorientasi pada kepentingan publik					
2.	Pengelolaan keuangan dilakukan secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan dan tidak produktif					
3.	Saya mengetahui semua dokumen dan formulir yang digunakan dalam akuntansi anggaran					
	Efisiensi					
4.	Keuangan daerah dikelola secara efisien dengan nilai keluaran (output) lebih besar dibandingkan nilai masukan (input) yang digunakan					

5.	Pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan pemerintah					
6.	Belanja tidak melebihi batas maksimum dan sudah efisien					
	<i>Efektivitas</i>					
7.	Keuangan daerah dikelola secara adil dan merata dimana ada kesempatan publik yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas					
8.	Keuangan daerah dikelola secara efektif dimana anggaran yang direalisasikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan					
9.	Ada kesesuaian antara misi dan visi dengan realisasi					
Sumber: Kuisioner dimodifikasi dari penelitian Suci Derma Juita (2008). Muhamad Widiyanta (2017).						

LAMPIRAN III
FREKUENSI DATA BERDASARKAN IDENTITAS

	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Latar Belakang Pendidikan	Masa Kerja
N	60	60	60	60	60

LAMPIRAN IV

DAFTAR DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN

X1 (<i>Good Governance</i>)									
Res	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	4	4	3	4	4	4	4	1	4
2	4	4	4	4	4	4	4	1	5
3	4	4	4	4	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
5	4	4	4	4	4	4	4	1	4
6	4	4	4	4	4	4	4	1	4
7	3	3	4	3	3	3	3	3	3
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	4	4	4	4	4	4	4	1	4
10	3	3	3	3	3	3	3	2	3
11	3	3	3	3	3	3	3	2	3
12	3	3	3	3	3	3	3	2	3
13	3	3	3	3	4	3	4	3	4
14	3	3	3	3	3	3	3	2	3
15	3	4	4	4	5	3	3	1	4
16	4	4	4	4	4	4	4	3	4
17	4	5	4	5	5	5	5	3	5
18	3	3	3	3	3	3	3	2	3
19	3	3	3	3	3	3	3	2	3
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3	3	3	2	3
23	3	3	3	3	3	3	3	2	3
24	3	3	3	3	3	3	3	2	3
25	3	3	3	3	3	3	3	2	3
26	3	3	3	3	3	3	3	2	3
27	3	3	3	3	3	3	3	2	3
28	3	3	3	3	3	3	3	2	3
29	4	4	3	4	4	4	4	1	4
30	4	4	4	4	4	4	4	3	4
31	3	3	3	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	1	5
33	4	4	3	4	4	3	5	3	4
34	4	4	3	4	4	5	5	1	5

35	4	4	2	5	5	5	5	3	4
36	4	4	2	5	5	5	5	3	4
37	4	4	4	4	5	4	4	3	4
38	3	4	3	4	5	4	4	3	4
39	3	3	3	3	3	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	2	4
41	5	4	5	5	4	4	4	4	4
42	4	4	5	5	5	5	5	1	5
43	3	3	5	5	5	5	5	1	5
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5
45	4	4	5	5	5	5	5	1	5
46	5	5	5	5	5	5	5	1	5
47	4	4	5	4	5	5	5	3	4
48	4	4	4	4	4	4	4	1	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	3	4
51	3	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	2	4
53	4	4	4	4	4	4	4	1	4
54	4	4	4	4	4	4	4	1	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	1	5
57	4	4	4	4	4	4	4	2	5
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	3	4	4	4	4	1	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4

X2 (Pengendalian Internal)									
Res	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	4	4	3	3	4	4	4	3	3
2	4	5	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	5	5	4	4	5
4	4	4	5	4	4	3	3	3	3
5	4	4	5	4	4	3	3	3	3
6	4	4	5	4	4	3	3	3	3
7	4	3	3	3	3	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	5	4	4	4	4	4	4	4
10	3	4	3	3	3	4	4	1	5
11	3	4	3	3	3	4	4	1	5
12	3	4	3	3	3	4	4	1	5

13	3	3	3	3	4	3	4	4	4
14	3	4	3	3	3	4	4	1	5
15	3	4	5	3	3	3	3	3	3
16	4	5	4	4	5	3	4	4	4
17	3	3	3	4	5	3	4	5	5
18	3	4	3	3	3	4	4	1	5
19	3	4	3	3	3	4	4	1	5
20	4	3	3	3	3	3	4	4	4
21	4	3	4	4	3	4	4	4	4
22	3	4	3	3	3	4	4	1	5
23	3	4	3	3	3	4	4	1	5
24	3	4	3	3	3	4	4	1	5
25	3	4	3	3	3	4	4	1	5
26	3	4	3	3	3	4	4	1	5
27	3	4	3	3	3	4	4	1	5
28	3	4	3	3	3	4	4	1	5
29	4	4	3	3	4	4	4	3	3
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	3	3	3	3	4	3	4	4	3
32	4	5	4	4	4	4	4	4	4
33	3	3	4	4	3	4	4	4	4
34	3	3	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	3	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	5	4	4	4
39	3	3	3	3	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	3	4	4
41	3	3	3	4	3	4	5	4	5
42	5	5	5	4	4	5	5	5	5
43	5	5	5	4	4	5	5	5	5
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	5	5	5	4	4	5	5	5	5
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	5
48	4	5	4	4	4	4	4	4	4
49	5	4	4	4	5	4	4	4	4
50	3	4	4	4	3	4	4	4	4
51	4	3	4	5	4	5	4	4	5
52	4	4	5	4	4	3	3	3	3
53	4	4	5	4	4	3	3	3	3

54	4	4	5	4	4	3	3	3	3
55	4	4	5	4	4	3	3	3	3
56	4	5	4	4	4	4	4	4	4
57	5	5	5	5	4	4	4	4	4
58	4	4	5	4	4	4	4	1	4
59	4	4	3	3	4	4	4	3	3
60	4	4	5	4	4	4	4	1	4

Y (Kinerja Pengelolaan Keuangan)									
Res	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	4	4	5	2	3	3	4	4	4
2	4	4	1	4	4	5	5	5	5
3	4	4	4	4	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	3	3	3	4	3	3	3	3	3
8	4	4	3	4	4	4	4	4	4
9	4	4	3	4	4	4	3	4	4
10	3	3	2	3	3	3	3	3	3
11	3	3	2	3	3	3	3	3	3
12	3	3	2	3	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	3	3	2	3	3	3	3	3	3
15	4	2	3	3	3	2	4	3	3
16	3	4	4	3	3	3	4	4	4
17	3	3	3	3	3	5	4	4	4
18	3	3	2	3	3	3	3	3	3
19	3	3	2	3	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	2	3	3	3	3	3	3
23	3	3	2	3	3	3	3	3	3
24	3	3	2	3	3	3	3	3	3
25	3	3	2	3	3	3	3	3	3
26	3	3	2	3	3	3	3	3	3
27	3	3	2	3	3	3	3	3	3
28	3	3	2	3	3	3	3	3	3
29	5	5	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	3
31	3	3	3	4	4	4	4	4	4

32	4	4	1	4	4	4	4	4	4
33	3	3	3	4	3	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	3	5	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	3	4	4	4	4	3	4	4	4
38	3	4	4	4	4	5	4	4	4
39	3	4	4	4	5	5	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	3
41	4	4	4	4	4	5	4	4	4
42	4	4	5	4	4	4	5	5	5
43	4	4	4	4	5	4	4	4	4
44	4	4	3	4	4	4	4	4	4
45	4	4	5	4	4	4	4	4	4
46	4	4	3	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	3	3	5
48	4	4	1	4	4	4	4	4	4
49	5	5	4	4	4	4	5	5	5
50	4	5	4	4	5	4	4	4	4
51	3	4	4	4	5	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	3	3	4
58	4	4	4	5	4	4	3	3	3
59	4	4	5	5	3	3	4	4	4
60	4	4	4	5	4	4	3	3	3

LAMPIRAN V

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

Uji Validitas *Good Governance* (X₁)

Pernyataan	r hitung	r tabel	Status
1	0,463	0,361	Valid
2	0,574	0,361	Valid
3	0,393	0,361	Valid
4	0,657	0,361	Valid
5	0,637	0,361	Valid
6	0,809	0,361	Valid
7	0,612	0,361	Valid
8	0,808	0,361	Valid
9	0,475	0,361	Valid

Uji Validitas Pengendalian Internal (X₂)

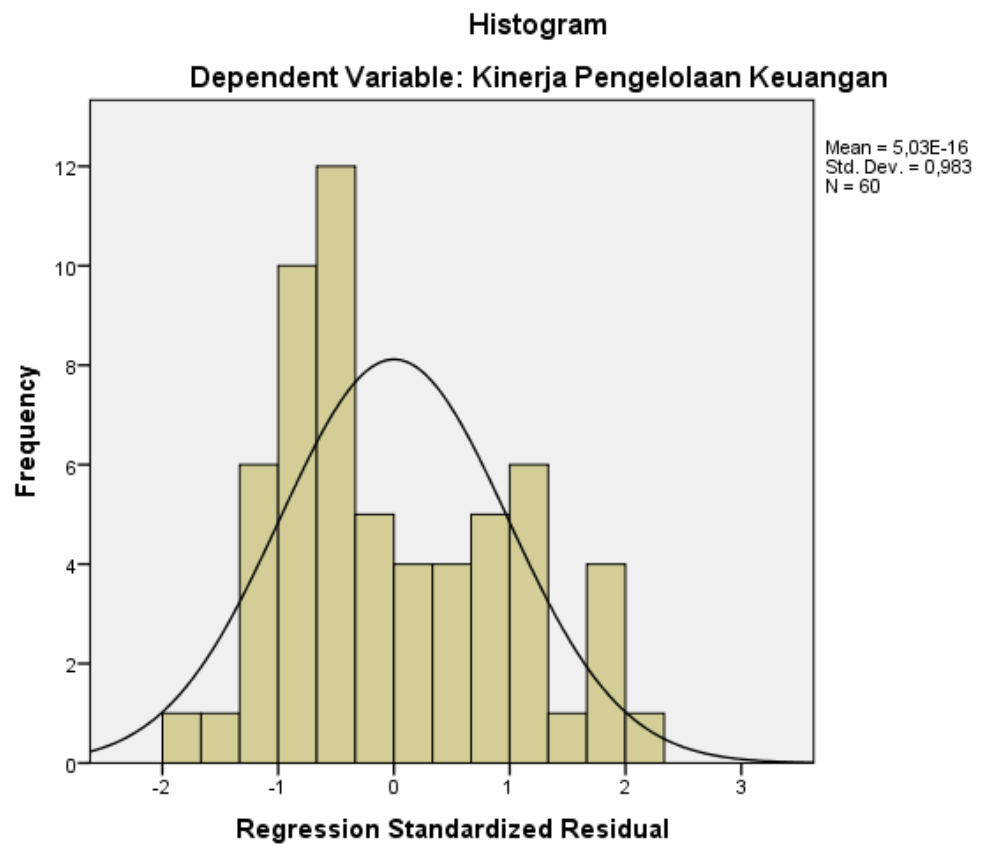
Pernyataan	r hitung	r tabel	Status
1	0,847	0,361	Valid
2	0,391	0,361	Valid
3	0,631	0,361	Valid
4	0,532	0,361	Valid
5	0,600	0,361	Valid
6	0,798	0,361	Valid
7	0,673	0,361	Valid
8	0,854	0,361	Valid
9	0,610	0,361	Valid

Uji Validitas Pengendalian Internal (Y)

Pernyataan	r hitung	r tabel	Status
1	0,425	0,361	Valid
2	0,699	0,361	Valid
3	0,568	0,361	Valid
4	0,614	0,361	Valid
5	0,720	0,361	Valid
6	0,837	0,361	Valid
7	0,683	0,361	Valid
8	0,537	0,361	Valid
9	0,785	0,361	Valid

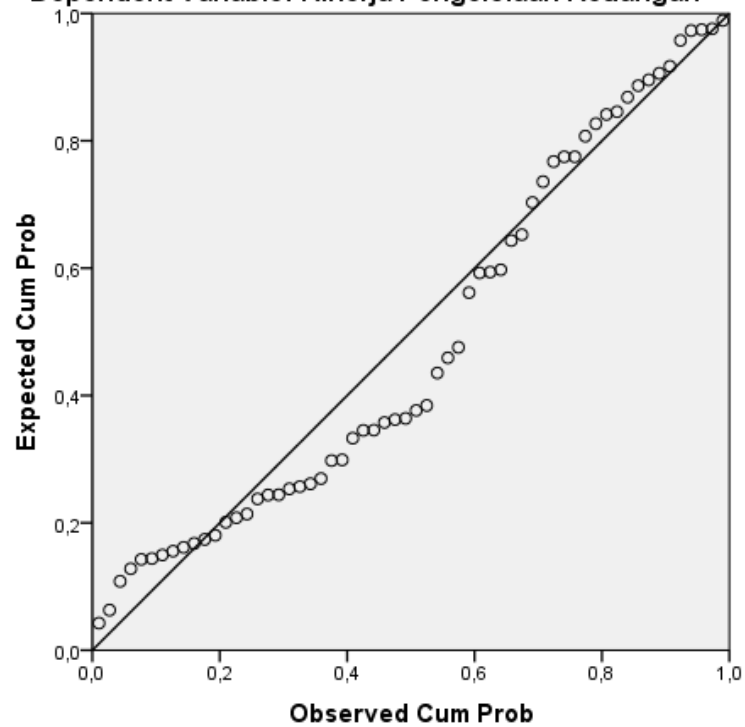
Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Good Governance</i> (X ₁)	0,837	0,70	Realible
Pengendalian Internal (X ₂)	0,773	0,70	Realible
Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	0,882	0,70	Realible

LAMPIRAN VI**UJI ASUMSI KLASIK****a. Uji Normalitas**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,95253289
	Absolute	,151
Most Extreme Differences	Positive	,151
	Negative	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		1,170
Asymp. Sig. (2-tailed)		,129

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,763 ^a	,581	,567	3,00389	1,009

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Good Governance

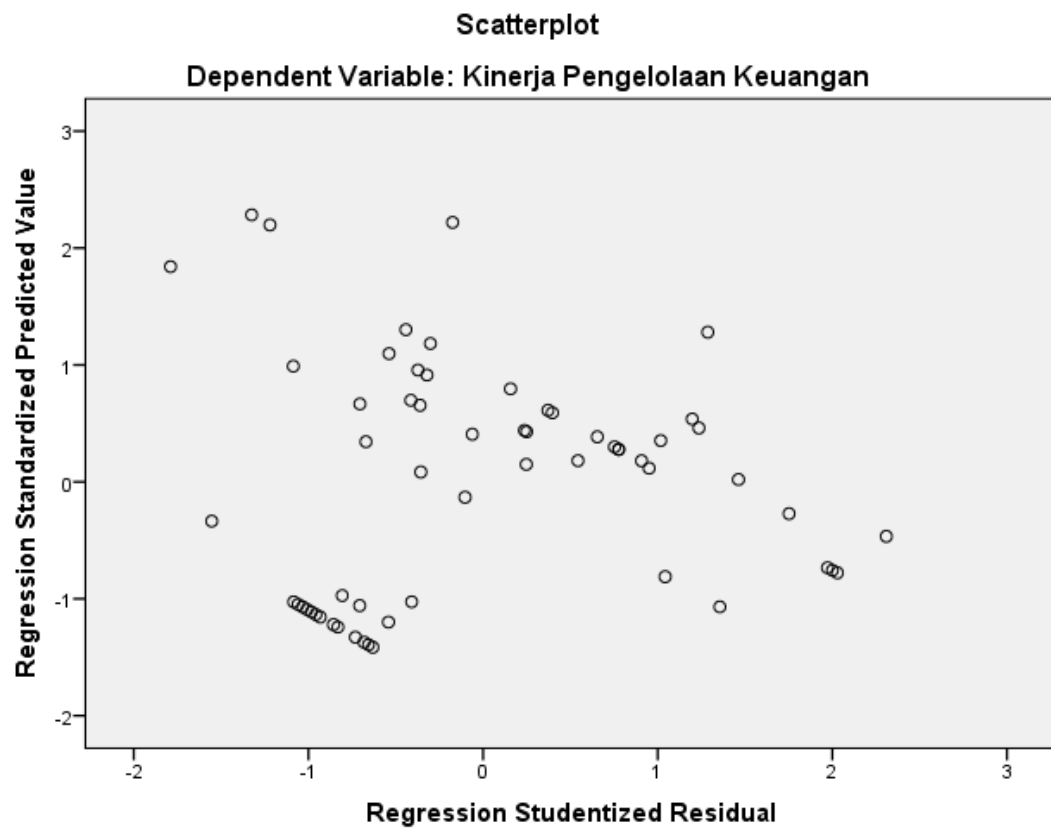
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

c. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3,751	3,894		,963	,340		
Good Governance	,075	,023	,326	3,308	,002	,755	1,325
Pengendalian Internal	,713	,129	,546	5,539	,000	,755	1,325

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

d. Heteroskedastisitas

LAMPIRAN VII

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,751	3,894		,963	,340
Good Governance	,075	,023	,326	3,308	,002
Pengendalian Internal	,713	,129	,546	5,539	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

LAMPIRAN VIII

HASIL UJI JIPOTESIS

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

R Square	Adjusted R Square
,581	,567

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Good Governance

b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

b. Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,751	3,894		,963	,340
Good Governance	,075	,023	,326	3,308	,002
Pengendalian Internal	,713	,129	,546	5,539	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

c. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	714,404	2	357,202	39,586	,000 ^b
Residual	514,330	57	9,023		
Total	1228,733	59			

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Good Governance

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Novita Riyati Sukma
2. NIM : 0502161047
3. TTL : Kutacane, 2 Februari 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jln Pahlawan, Desa Simpang Empat, Kec Lawe Bulan,
Kab Aceh Tenggara

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan TKIT Al-Khansa' Berijazah Tahun 2004
2. Tamatan SD Swasta Muhammadiyah 11 Kutacane Berijazah Tahun 2010
3. Tamatan SMP Negeri 3 Kutacane Berijazah Tahun 2013
4. Tamatan SMA Negeri 1 Kutacane Berijazah Tahun 2016
5. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Pramuka SMP Negeri 3 Kutacane (2011)